



BADAN KEAHLIAN DPR RI
Bridging the Research to the Role and Functions of Parliament
"EVIDENCE-BASED LEGISLATIVE POLICY-MAKING"

**INFO DWI MINGGUAN ALAT KELENGKAPAN DEWAN
TIM SENERGI BADAN KEAHLIAN
SETJEN DPR RI**

KEGIATAN

MS III Tahun Sidang 2021-2022

(24 Januari – 05 Februari 2022)

INFO DWI MINGGUAN ALAT KELENGKAPAN DEWAN

DIKELOLA OLEH:

TIM SINERGI ANTARA BADAN KEAHLIAN, PARA KABAG SET AKD DEPUTI PERSIDANGAN, DAN TENAGA AHLI AKD.

DAFTAR ISI

KOMISI II	1
A. FUNGSI LEGISLASI	1
B. FUNGSI ANGGARAN	1
C. FUNGSI PENGAWASAN	1
D. TUGAS KHUSUS	4
KOMISI III	5
A. FUNGSI LEGISLASI	5
B. FUNGSI ANGGARAN	5
C. FUNGSI PENGAWASAN	6
KOMISI IV	28
A. FUNGSI LEGISLASI	28
B. FUNGSI ANGGARAN	28
C. FUNGSI PENGAWASAN	29
KOMISI V	32
A. FUNGSI LEGISLASI	32
B. FUNGSI ANGGARAN	32
C. FUNGSI PENGAWASAN	32

KOMISI VI	44
A. FUNGSI LEGISLASI	44
B. FUNGSI ANGGARAN	44
C. FUNGSI PENGAWASAN	44
KOMISI VII	54
A. FUNGSI LEGISLASI	54
B. FUNGSI ANGGARAN	54
C. FUNGSI PENGAWASAN	54
KOMISI VIII	59
A. FUNGSI LEGISLASI	59
B. FUNGSI ANGGARAN	59
C. FUNGSI PENGAWASAN	60
KOMISI IX	62
A. FUNGSI LEGISLASI	62
B. FUNGSI ANGGARAN	62
C. FUNGSI PENGAWASAN	63

KOMISI X	72
A. FUNGSI LEGISLASI	72
B. FUNGSI ANGGARAN	72
C. FUNGSI PENGAWASAN	73
BADAN LEGISLASI	79
BADAN KERJA SAMA ANTAR PARLEMEN	80
MAHKAMAH KEHORMATAN DEWAN	87
BADAN ANGGARAN	88
BADAN URUSAN RUMAH TANGGA	93
BADAN AKUNTABILITAS KEUANGAN NEGARA	95

LAPORAN DWI MINGGUAN KOMISI II

A. KEGIATAN FUNGSI LEGISLASI

NO	JUDUL RUU	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	7 RUU tentang Provinsi (Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Utara)	a. Penyusunan b. Pembahasan c. <i>Harmonisasi</i> ; d. <i>Prolegnas</i> ; e. <i>Pemantauan & peninjauan</i>	Kunjungan Kerja Panja Pembahasan 7 (tujuh) RUU tentang Provinsi ke Provinsi Kalimantan Selatan dan Provinsi Sulawesi Selatan.	Dalam rangka mendapatkan masukan terkait pembahasan 7 (tujuh) RUU tentang Provinsi.

B. KEGIATAN FUNGSI ANGGARAN

-

C. KEGIATAN FUNGSI PENGAWASAN

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	Kementerian Dalam Negeri RI, KPU, Bawaslu, dan DKPP	a. Pelaksanaan undang-undang; b. Pelaksanaan keuangan negara; dan/atau c. Kebijakan pemerintah.	Rapat Kerja/Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR RI dengan Menteri Dalam Negeri, Ketua KPU, Ketua	Berdasarkan pemaparan dari KPU RI, Bawaslu RI, dan DKPP RI serta masukan dari Pemerintah terhadap rencana penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 dan pemungutan suara serentak

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			Bawaslu, dan Ketua DKPP, dengan agenda membahas Penetapan Jadwal Pemilu Serentak Tahun 2024	nasional dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota Serentak tahun 2024, sesuai dengan ketentuan Pasal 75 Ayat 4 Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Pasal 201 Ayat 8 Undang-undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, maka dengan ini Komisi II DPR RI bersama Menteri Dalam Negeri, KPU RI, Bawaslu RI dan DKPP RI menyepakati beberapa hal sebagai berikut: 1. Penyelenggaraan pemungutan suara Pemilihan Umum Serentak (untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR RI, DPRD

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
				<p>Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Anggota DPD RI) dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 14 Februari 2024.</p> <p>2. Pemungutan suara serentak nasional dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 27 November 2024.</p> <p>3. Tentang tahapan, program, dan jadwal, penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 ditetapkan setelah dilaksanakan pendalaman lebih lanjut oleh DPR RI, Pemerintah, dan Penyelenggara Pemilu.</p>
2.	Pemerintah Kab. Kulon Progo, Kab. Salatiga, dan Kab. Pasuruan	<p>a. Pelaksanaan undang-undang;</p> <p>b. Pelaksanaan keuangan negara; dan/atau</p> <p>c. Kebijakan pemerintah.</p>	Kunjungan kerja spesifik Komisi II DPR RI ke Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Salatiga, dan Kabupaten Pasuruan	Dalam rangka pertemuan dengan Kepala Daerah dan peninjauan lapangan terkait pelayanan publik.

D. TUGAS KHUSUS

1. Mengajukan, memberikan persetujuan, atau memberikan pertimbangan atas keputusan berdasarkan mufakat;
2. Pemberian pertimbangan terhadap calon duta besar;
3. Persetujuan pemindahtanganan asset negara;
4. Persetujuan perjanjian internasional yang berdampak luas;
5. Pemilihan anggota BPK;
6. Penegakan kode etik;
7. Kerja sama antar parlemen;
8. Akuntabilitas keuangan;
9. Kerumahtangaan DPR RI.

LAPORAN DWI MINGGUAN KOMISI III

A. KEGIATAN FUNGSI LEGISLASI

NO	JUDUL RUU	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	RUU tentang Hukum Acara Perdata	Pembahasan Tk. I	<p>Berdasarkan Keputusan Rapat Intern Komisi III DPR RI tanggal 11 Januari 2022 bahwa pembahasan RUU tentang Hukum Acara Perdata akan dilaksanakan pada tanggal 2 Februari 2022, yaitu Raker Komisi III dengan Menteri Hukum dan HAM RI.</p> <p>Raker Komisi III DPR RI dengan Menteri Hukum dan HAM pada tanggal 2 Februari 2022, membahas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penjelasan Pemerintah atas RUU tentang Hk Acara Perdata; 2. Pandangan Umum Fraksi atas RUU tentang Hk Acara Perdata; 3. Membahas jadwal dan rencana kerja pembahasan RUU tentang Hk Acara Perdata; 4. Penyerahan DIM RUU tentang Hk Acara Perdata;; 5. Pembahasan DIM; 6. Pembentukan Panja RUU tentang Hk Acara Perdata 7. Lain-lain 	<p>Sesuai Keputusan Rapat Pimpinan Komisi III DPR RI tanggal 31 Januari 2022, bahwa Rapat Kerja Komisi III DPR RI dengan Menteri Hukum dan HAM RI semula tanggal 2 Februari 2022 ditunda menjadi tanggal 16 Februari 2022.</p>

B. KEGIATAN FUNGSI ANGGARAN

-

C. KEGIATAN FUNGSI PENGAWASAN

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	Rapat Kerja	<p>Membahas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi terkait dengan kinerja dan capaian tahun 2021, dengan pagu anggaran Tahun 2021 sebesar Rp.106.618.215.863.000,- 2. Rencana kerja dan program prioritas Polri Tahun 2022 dengan pagu anggaran sebesar Rp.111.024.024.394.000,-. 3. Tindak lanjut kesimpulan rapat pada Raker tanggal 16 Juni 2021. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Raker dilaksanakan secara fisik & virtual. 2. Pelaksanaan tanggal 24 Januari 2022, Raker dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Bp. H. Ahmad Sahroni, S.E., M.I.Kom. 3. Raker dihadiri oleh Kapolri & jajaran. 4. Dalam raker, Komisi III memberikan beberapa dokumen kepada Kapolri: 5. Hasil kunker Reses MP I & II TS 2021-2022 dan Komisi III mencatat beberapa permasalahan dan kebutuhan anggaran yang perlu diperhatikan oleh Kapolri. 6. Pengaduan Masyarakat yang masuk melalui Komisi III dan perlu ditindaklanjuti berkaitan dengan bidang tugas Kepolisian Negara RI kepada Kapolri.

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
				<p>7. <u>Kesimpulan:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Komisi III DPR RI menerima penjelasan mengenai capaian kinerja tahun 2021 serta rencana kerja tahun 2022 dan program-program yang menjadi prioritas serta akan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan dan pencapaiannya. 2) Komisi III DPR RI mengapresiasi dan mendorong kinerja Kapolri dalam mewujudkan program prioritas dan Komitmen Kapolri termasuk aplikasi tunggal Presisi Polri agar segera terwujud sesuai dengan target-target dan penekanan Program Transformasi menuju Polri yang Presisi. 3) Komisi III DPR RI mendukung strategi

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
				<p>penegakan hukum melalui scientific investigation dan prinsip keadilan restoratif dalam penanganan perkara dengan memperhatikan prinsip keadilan, transparansi, akuntabilitas, dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>4) Komisi III DPR RI mendukung anggaran Polri Tahun Anggaran 2022 serta mendukung pengembangan struktur organisasi Polri guna pelaksanaan operasional tugas Polri.</p> <p>5) Komisi III DPR RI akan mengadakan Rapat Dengar Pendapat dengan satuan kerja Polri pada Masa Persidangan IV Tahun 2021-2022.</p>

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
2.	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME	Rapat Kerja	<p>Membahas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi Kinerja dan capaian target BNPT di Tahun 2021, dengan pagu anggaran sebesar Rp.442.759.764.000,- 2. <i>Roadmap</i> Tahun 2022, program prioritas, dan strategi dalam pencapaiannya, dengan pagu anggaran sebesar Rp.453.867.874.000,- 3. Tindak Lanjut Kesimpulan RDP 15 September 2021. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Raker dilaksanakan secara fisik & virtual. 2. Pelaksanaan tanggal 25 Januari 2022, Raker dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Bp. H. Desmond Junaidi Mahesa, S.H., M.H. 3. Raker dihadiri oleh Kepala BNPT & jajaran. 4. <u>Kesimpulan</u>: <ol style="list-style-type: none"> 1) Komisi III DPR RI dapat menerima penjelasan capaian kinerja BNPT pada tahun 2021 dan Roadmap, Program Prioritas, dan Strategi Pencapaian BNPT di tahun 2022 yang berfokus pada penguatan kinerja dan kapasitas BNPT. 2) Komisi III DPR RI mendesak BNPT untuk memprioritaskan program Pencegahan Terorisme (program deradikalisasi, kontra

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
				radikalasi, dan kesiapsiagaan nasional) berdasarkan prinsip perlindungan HAM dan kehati-hatian dalam penyusunan kebijakan dan strategi penanggulangan terorisme, sehingga dapat mendeteksi dini dan mengantisipasi penyebaran paham radikalisme dan ekstrimisme di masyarakat yang dilakukan melalui berbagai media dan memanfaatkan perkembangan teknologi. 3) Komisi III DPR RI mendukung upaya BNPT untuk melakukan koordinasi dan kolaborasi dalam forum kerjasama dengan seluruh aparat penegak hukum, Kementerian / Lembaga, lembaga

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
				<p>sejenis dari negara-negara lain, dan seluruh elemen masyarakat dalam rangka meningkatkan efektivitas tugas dan fungsi BNPT yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.</p> <p>4) Komisi III DPR RI meminta BNPT untuk terus berkoordinasi dan mendorong Pemerintah dalam pembentukan Peraturan Presiden tentang Susunan Organisasi BNPT dan menyampaikan hasilnya kepada Komisi III DPR RI.</p> <p>5) Komisi III DPR RI berkomitmen untuk mendukung anggaran yang dibutuhkan BNPT dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan dalam program prioritasnya.</p>

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
3.	KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI	Rapat Kerja	<p>Membahas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi kinerja KPK sepanjang tahun 2021 dengan pagu anggaran sebesar Rp.1.159.908.593.000,- 2. Program prioritas KPK tahun 2022 dengan pagu anggaran sebesar Rp.1.343.222.899.000,-. 3. Tindak lanjut RDP tanggal 10 Maret 2021. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Raker dilaksanakan secara fisik & virtual. 2. Pelaksanaan tanggal 26 Januari 2022, Raker dipimpin oleh Ketua Komisi III DPR RI, Bp. Ir. Bambang Wuryanto, M.B.A. 3. Raker dihadiri oleh Komisioner KPK & jajaran. 4. <u>Kesimpulan:</u> <ol style="list-style-type: none"> 1) Komisi III DPR RI dapat menerima penjelasan capaian kinerja KPK pada Tahun 2021 dan mendukung Road Map, Rencana Strategi, Arah Kebijakan, serta Rencana Kinerja KPK di tahun 2022. 2) Komisi III DPR RI mendorong peningkatan program pencegahan dan monitoring serta penindakan korupsi, baik di Kementerian/Lembaga maupun di daerah, yang berfokus pada optimalisasi pendapatan

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
				<p>negara dan kesejahteraan rakyat, serta menghindari kebocoran pendapatan negara.</p> <p>3) Komisi III DPR RI mendorong dan mendukung KPK dalam meningkatkan program pemberantasan tindak pidana korupsi.</p> <p>4) Komisi III DPR RI akan mengadakan Rapat Dengar Pendapat dengan Satuan Kerja KPK pada Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2021-2022.</p>
4.	KEJAKSAAN AGUNG RI	Rapat Kerja (lanjutan)	<p>Membahas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi kinerja dan capaian Kejaksaan tahun 2021 dengan Pagu Anggaran sebesar Rp.8.876.990.677.000,-, 2. Rencana kerja dan target-target capaian Kejaksaan tahun 2022 dengan pagu anggaran sebesar Rp.10.109.965.844.000,- 3. Tindak Lanjut Kesimpulan Rapat Kerja 14 Juni 2021. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Raker Komisi III DPR RI dengan Kejaksaan Agung RI merupakan lanjutan Rapat Kerja tanggal 17 Januari 2022. 2. Raker dilaksanakan secara fisik & virtual. 3. Pelaksanaan tanggal 27 Januari 2022, Raker dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Bp. Dr. Ir. H. Adies Kadir, S.H., M.Hum.

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
				<p>4.Raker dihadiri oleh Jaksa Agung & jajaran.</p> <p>5.Dalam raker, Komisi III memberikan beberapa dokumen kepada Jaksa Agung:</p> <p>a.Hasil kunker Reses MP I & II TS 2021-2022 dan Komisi III mencatat beberapa permasalahan dan kebutuhan anggaran yang perlu diperhatikan oleh Jaksa Agung.</p> <p>b.Pengaduan Masyarakat yang masuk melalui Komisi III dan perlu ditindaklanjuti berkaitan dengan bidang tugas Kejaksaan Negara RI kepada Jaksa Agung.</p> <p>6. <u>Kesimpulan:</u></p> <p>1) Komisi III DPR RI dapat menerima penjelasan Jaksa Agung mengenai capaian kinerja tahun 2021 serta rencana kerja tahun 2022 dan program yang menjadi prioritas,</p>

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
				<p>strategi yang dilakukan beserta tolok ukur keberhasilan kinerja serta akan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan dan pencapaiannya.</p> <p>2) Komisi III DPR RI meminta Jaksa Agung untuk mengoptimalkan upaya penegakan hukum melalui pendekatan keadilan restoratif yang dilaksanakan secara sistematis dan terukur sesuai amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI dengan selalu memperhatikan aspek transparansi dan akuntabilitas perkara.</p> <p>3) Komisi III DPR RI mendesak Jaksa Agung untuk menerapkan</p>

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
				<p>sistem evaluasi reward and punishment secara tertib dan transparan dalam pola mutasi dan promosi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>4) Komisi III DPR RI akan mengadakan Rapat Dengar Pendapat dengan satuan kerja Kejaksaan pada masa persidangan IV Tahun Sidang 2021-2022.</p>
5.	ALIANSI BORNEO BERSATU	Rapat Dengar Pendapat Umum	<p>Membahas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyampaian beberapa masalah yang terjadi di wilayah Kalimantan. 2. Pernyataan Edy Mulyadi yang sengaja diviralkan di chanel youtube “edy chanel” tanggal 18 Januari 2022. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. RDPU dilaksanakan secara fisik & virtual. 2. Pelaksanaan tanggal 27 Januari 2022, RDPU dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Bp. Ir. Pangeran Khairul Saleh, M.M. 3. <u>Hasil bahasan:</u> <ol style="list-style-type: none"> 1) Aliansi Borneo Bersatu menyampaikan bahwa Edi telah Mulyadi mengucapkan hinaan

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
				<p>(dugaan penghinaan atas IKN) dengan sengaja.</p> <p>2) Aliansi Borneo Bersatu memberikan pernyataan sikap, yaitu:</p> <p>a. Mengecam pernyataan Edy Mulyadi yang diunggah oleh yang bersangkutan di medsos pada tanggal 18 Januari 2022 yang telah menghina dan melecehkan Kalimantan dan telah melukai harga diri masyarakat dayak.</p> <p>b. Mengecam penghinaan terhadap Menteri Pertahanan Indonesia dengan mengatakan Menteri Pertahanan adalah harimau yang berubah menjadi kucing.</p> <p>c. Mendukung langkah-langkah aparat negara (Kapolri) untuk melakukan langkah-langkah penegakan</p>

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
				<p>hukum terhadap Edy Mulyadi Cs.</p> <p>d. Mendesak dilaksanakannya sidang adat dayak terhadap Edy Mulyadi Cs.</p> <p>e. Dalam rangka implementasi terwujudnya IKN, wajib melibatkan secara penuh kelembagaan adat dayak para putra asli dayak dalam mengawal terbentuknya IKN.</p> <p>3)Tanggapan Komisi III DPR RI:</p> <p>a. Komisi III DPR RI akan terus mengawal proses hukum yang telah dilakukan oleh Kepolisian Negara RI.</p> <p>b. Saat ini kasus Edy Mulyadi telah masuk dalam tahap penyidikan di Mabes Polri.</p>

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
				c. Agar Aliansi Borneo Bersatu / masyarakat Kalimantan tidak mengambil tindakan yang menyimpang dari hukum yang berlaku karena Indonesia adalah negara Hukum.
6.	1. Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Barat. 2. Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat	Kunjungan Kerja Spesifik	Pengawasan penegakan hukum terkait dengan: 1. pengamanan penanganan Covid-19; 2. Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).	1. Dilaksanakan pada hari Jumat sd Minggu, tanggal 28 sd 30 Januari 2022. 2. Kunspek dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Bp. Ir. Pangeran Khairul Saleh, M.M.. 3. Anggota Tim berdasarkan proporsional komposisi fraksi.
7.	PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT	Kunjungan Kerja Spesifik	Pengawasan atas penegakan hukum terkait mekanisme penyelesaian Perkara di masa pandemi covid-19.	1. Dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 31 Januari 2022 , pertemuan dengan Ketua PN Jakpus & jajaran. 2. Kunspek dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Bp. Dr. Ir. H. Adies Kadir, S.H., M.Hum. 3. Anggota Tim berdasarkan proporsional komposisi fraksi.

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
8.	PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN	Rapat Kerja	<p>Membahas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi kinerja PPATK sepanjang tahun 2021 dengan pagu anggaran sebesar Rp.203.703.401.000,- dan perbandingan dengan tahun-tahun sebelumnya, 2. <i>Roadmap</i> Tahun 2022, program prioritas, dan strategi dalam pencapaiannya, dengan pagu anggaran sebesar Rp.212.672.381.000,- 3. Tindak lanjut RDP tanggal 29 September 2021. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Raker dilaksanakan secara fisik & virtual. 2. Pelaksanaan tanggal 31 Januari 2022, Raker dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Bp. H. Ahmad Sahroni, S.E., M.I.Kom.. 3. Raker dihadiri oleh Kepala PPATK & jajaran. 4. <u>Kesimpulan:</u> <ol style="list-style-type: none"> 1) Komisi III DPR RI menerima penjelasan capaian kinerja PPATK pada tahun 2021 dan mendukung Rencana Kinerja dan Program Prioritas PPATK di tahun 2022, serta akan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan dan pencapaiannya. 2) Komisi III DPR RI menerima usulan tambahan anggaran PPATK tahun 2022 sebesar Rp63.770.819.000,-

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
				<p>dalam rangka meningkatkan kemampuan PPATK untuk mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme.</p> <p>3) Komisi III DPR RI meminta Kepala PPATK untuk meningkatkan pengawasan dan kewaspadaan terhadap arus transaksi keuangan yang terkait dengan kejahatan narkoba, kejahatan finansial melalui transaksi atau alat pembayaran digital, <i>green financial crime</i> dan kejahatan-kejahatan lain yang memanfaatkan perkembangan teknologi.</p> <p>4) Komisi III DPR RI meminta Kepala PPATK untuk melakukan kerjasama dengan Kementerian/Lembaga</p>

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
				<p>terkait dalam rangka meningkatkan kemampuan untuk mengoptimalkan penerimaan negara dan meningkatkan indeks integritas lembaga keuangan.</p> <p>5) Komisi III DPR RI meminta Kepala PPATK untuk menerbitkan rekomendasi atas calon-calon pejabat negara yang akan dilakukan uji kelayakan (<i>fit and proper test</i>) oleh Komisi III DPR RI.</p>
9.	KEMENTERIAN HUKUM DAN HAN RI	Rapat Kerja	<p>Membahas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi kinerja dan capaian Kemenkumham Tahun 2021 dengan pagu anggaran sebesar Rp.16.610.890.575.000,- 2. Rencana kerja Kemenkumham di Tahun 2022, program prioritas, dan strategi dalam pencapaiannya dengan pagu anggaran sebesar Rp.17.463.529.394.000,- 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Raker dilaksanakan secara fisik & virtual. 2. Pelaksanaan tanggal 2 Februari 2022, Raker dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Bp. Ir. Pangeran Khairul Saleh, M.M. 3. Raker dihadiri oleh Menkumham & jajaran.

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p>3. Tindak Lanjut Kesimpulan Raker 9 Juni 2021.</p>	<p>4. Dalam raker, Komisi III memberikan beberapa dokumen kepada Menkumham:</p> <p>5. Hasil kunker Reses MP I & II TS 2021-2022 dan Komisi III mencatat beberapa permasalahan dan kebutuhan anggaran yang perlu diperhatikan oleh Menkumham.</p> <p>6. <u>Kesimpulan:</u></p> <p>1) Komisi III DPR RI menerima penjelasan realisasi anggaran dan capaian target kinerja Kemenkumham pada tahun 2021 dan mendukung Rencana Kerja Kemenkumham dan Program Prioritas di tahun 2022.</p> <p>2) Komisi III DPR RI meminta Menteri Hukum dan HAM RI untuk mendorong percepatan penyelesaian legislasi, khususnya kebijakan</p>

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
				<p>dalam rangka pembaruan hukum nasional, reformasi penegakan hukum, penerapan keadilan restoratif, perlindungan hak asasi manusia, serta mendukung upaya optimalisasi penerimaan negara dan perekonomian masyarakat.</p> <p>3) Dalam upaya pengurangan angka kelebihan populasi (<i>overcrowding</i>) dan berbagai permasalahan di bidang Pemasyarakatan, Komisi III DPR RI meminta Menteri Hukum dan HAM RI untuk menerapkan Sistem Pemasyarakatan yang terukur dan adil, khususnya dalam pemberian hak-hak warga binaan, agar dilakukan sesuai dengan</p>

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
				<p>prinsip persamaan di muka hukum, rehabilitasi, reintegrasi sosial, dan semangat keadilan restoratif.</p> <p>4) Komisi III DPR RI meminta Menteri Hukum dan HAM RI untuk kembali meningkatkan pengawasan terhadap orang asing dan tenaga kerja asing serta melakukan kerjasama dengan seluruh pihak terkait untuk memonitor pergerakan dan mendeteksi potensi pelanggaran aturan oleh orang asing.</p> <p>5) Komisi III DPR RI meminta Menteri Hukum dan HAM RI untuk melakukan penataan kembali terhadap pengelolaan Sumber Daya Manusia pada sistem mutasi, promosi, atau pengisian jabatan,</p>

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
				<p>yang dilakukan dengan mekanisme reward and punishment secara terukur, transparan, dan obyektif.</p> <p>6) Komisi III DPR RI akan menggelar Rapat Dengar Pendapat dengan Satuan Kerja Kementerian Hukum dan HAM dalam rangka pengawasan kinerja dan pelaksanaan program prioritas pada Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2021-2022.</p> <p>7) Menteri Hukum dan HAM RI akan menyampaikan kelengkapan jawaban tertulis terkait pertanyaan Komisi III DPR RI pada Rapat Kerja tanggal 2 Februari 2022, selambatlambatnya 10 (sepuluh) hari kerja.</p>

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
10.	<p>1. Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan.</p> <p>2. Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan</p> <p>3. Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin</p>	Kunjungan Kerja Spesifik	Kunker Spesifik dalam rangka Pengawasan penegakan hukum atas kasus tindak pidana kekerasan seksual terhadap mahasiswi Universitas Lambung Mangkurat (ULM) di Kalsel	<p>1. Dilaksanakan pada hari Kamis sd Sabtu, tanggal 3 sd 5 Februari 2022.</p> <p>2. Kunspek dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Bp. Ir. Pangeran Khairul Saleh, M.M.,</p> <p>3. Anggota Tim berdasarkan proporsional komposisi fraksi.</p> <p>4. Dalam pertemuan di Mapolda Kasel, Kapolda menghadirkan pula Rektor dan Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat (ULM).</p>

LAPORAN DWI MINGGUAN KOMISI IV

A. KEGIATAN FUNGSI LEGISLASI

-

B. KEGIATAN FUNGSI ANGGARAN

NO	INSTITUSI	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	Kementerian Pertanian	a. Pelaksanaan undang-undang; b. Pelaksanaan keuangan negara; a. Kebijakan Pemerintah	a. Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Tahun 2021 b. Automatic Adjustment Belanja Kementerian Kelautan dan Perikanan TA. 2022; dan a. Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2022.	
2.	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Badan Restorasi Gambut dan Mangrove	a. Pelaksanaan undang-undang; b. Pelaksanaan keuangan negara; b. Kebijakan Pemerintah	a. Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Tahun 2021 b. Automatic Adjustment Belanja Kementerian Kelautan dan Perikanan TA. 2022; dan b. Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2022.	
3.	Kementerian Kelautan dan Perikanan	a. Pelaksanaan undang-undang; b. Pelaksanaan keuangan negara; c. Kebijakan Pemerintah	a. Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Tahun 2021 b. Automatic Adjustment Belanja Kementerian Kelautan dan Perikanan TA. 2022; dan c. Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2022.	

NO	INSTITUSI	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
4.	Kementerian Pertanian (13 Eselon 1)	a. Pelaksanaan undang-undang; b. Pelaksanaan keuangan negara; c. Kebijakan Pemerintah	a. Automatic Adjustment Belanja Kementerian Pertanian TA 2022; b. Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2022; dan c. lain-lain, yaitu terkait dengan: - Permasalahan Pupuk Subsidi - Permasalahan Bantuan Pemerintah - Program Pemerintah yang Dibintangkan	

C. KEGIATAN FUNGSI PENGAWASAN

NO	INSTITUSI	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	Kementerian Pertanian (3 Eselon 1), Kementerian Kelautan dan Perikanan (1 Eselon 1), dan PT PIHC	a. Pelaksanaan undang-undang; b. Pelaksanaan keuangan negara; c. Kebijakan Pemerintah	Membahas hal-hal yang terkait dengan permasalahan Pupuk.	
2.	Kunjungan Kerja Spesifik	a. Pelaksanaan undang-undang; b. Pelaksanaan keuangan negara; c. Kebijakan Pemerintah	Kunjungan Kerja ke Kota Denpasar, Provinsi Bali - Meninjau dan berdiskusi mengenai penanganan sampah di Taman Hutan Raya Provinsi Bali (Calon Lokasi Presidensi G20) - Meninjau dan berdiskusi mengenai permasalahan pengelolaan sampah di TPA Sarbagita, Desa Suwung, Kecamatan Sesetan	

NO	INSTITUSI	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
3.	Kunjungan Kerja Spesifik	a. Pelaksanaan undang-undang; b. Pelaksanaan keuangan negara; c. Kebijakan Pemerintah	Kunjungan Kerja ke Kabupaten Pelelawan, Provinsi Riau - Melakukan Sidak ke Areal Kerja PT. Guna Dodos di Desa Seikijang, Kecamatan Bandar Seikijang, Kabupaten Pelelawan terkait penggunaan kawasan hutan non procedural - Berdiskusi mengenai permasalahan penyelesaian penggunaan dan pelepasan lawasan hutan	
4.	Kunjungan Kerja Spesifik	a. Pelaksanaan undang-undang; b. Pelaksanaan keuangan negara; c. Kebijakan Pemerintah	Kunjungan Kerja ke Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur - Meninjau Pabrik Garam ke PT Garam dan berdiskusi dengan Perwakilan Petambak Garam	
5.	Kunjungan Kerja Spesifik	a. Pelaksanaan undang-undang; b. Pelaksanaan keuangan negara; d. Kebijakan Pemerintah	Kunjungan Kerja ke Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah - Meninjau lahan sawah milik Petani di Desa Jambanan, Kecamatan Sidoharjo, Kabupaten Sragen yang menggunakan arus listrik untuk mengatasi hama tikus	
6.	Kunjungan Kerja Spesifik	a. Pelaksanaan undang-undang; b. Pelaksanaan keuangan negara; c. Kebijakan Pemerintah	Kunjungan Kerja ke Kabupaten Kulonprogo, Daerah Istimewa Yogyakarta - Meninjau dan berdiskusi mengenai pelaksanaan kegiatan Rehabilitasi Daerah Aliran Sungai (Rehab DAS) Kewajiban Pemegang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan	

NO	INSTITUSI	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
7.	Kunjungan Kerja Spesifik	a. Pelaksanaan undang-undang; b. Pelaksanaan keuangan negara; c. Kebijakan Pemerintah	Kunjungan Kerja ke Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah - Meninjau dan berdiskusi mengenai teknologi dan novasi alat penangkapan ikan, uji terap teknik, serta standarisasi dan sertifikasi bidang penangkapan ikan di UPT Balai Besar Penangkapan Ikan Kota Semarang	

LAPORAN DWI MINGGUAN KOMISI V

A. KEGIATAN FUNGSI LEGISLASI

-

B. KEGIATAN FUNGSI ANGGARAN

-

C. KEGIATAN FUNGSI PENGAWASAN

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA (BMKG) DAN BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN (BASARNAS)	Rapat Dengar Pendapat tgl. 24 Jan 2022; Dengan agenda: 1. Evaluasi Pelaksanaan APBN TA 2021; 2. Membahas program Kerja Tahun Anggaran 2022 untuk masing-masing Badan; 3. Lain-lain.	1. RDP dilaksanakan secara fisik & virtual. 2. <u>Kesimpulan:</u> 1) Terkait dengan evaluasi pelaksanaan anggaran BMKG dan Basarnas, Komisi V DPR RI memberikan apresiasi atas capaian realisasi dalam TA 2021; 2) Terhadap program/kegiatan di TA 2021 yang tidak terealisasi, Komisi V DPR RI meminta BMKG dan Basarnas agar permasalahan dan kendala teknis pada pelaksanaan program/kegiatan TA 2021 dapat diselesaikan sehingga	

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p>tidak terulang lagi pada TA 2022;</p> <p>3) Komisi V DPR RI meminta BMKG dan Basarnas agar:</p> <p>a. dalam pelaksanaan program pelatihan memperhatikan fasilitas pendukung untuk peserta;</p> <p>b. memperbanyak program pelatihan untuk masyarakat seperti Sekolah lapang iklim, sekolah lapang cuaca nelayan, dan pelatihan potensi SAR;</p> <p>4) Komisi V DPR RI sepakat dengan BMKG untuk melaksanakan RDP dengan Kepala BMKG dan menghadirkan para Deputi untuk membahas lebih detail terkait evaluasi pelaksanaan APBN TA 2021 dan program/kegiatan TA 2022, selanjutnya Komisi V DPR RI sepakat dengan Basarnas untuk melaksanakan RDP dengan para deputi pada masa sidang berikutnya.</p>	

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
2.	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	Rapat Kerja tgl 25 Jan 2022; Dengan agenda: 1. Evaluasi Pelaksanaan APBN TA 2021; 2. Membahas program Kerja Tahun Anggaran 2022 Kementerian PUPR; 3. Lain-lain	1. Raker dilaksanakan secara fisik & virtual. 2. <u>Kesimpulan:</u> 1) Terkait dengan evaluasi pelaksanaan anggaran Kementerian PUPR, Komisi V DPR RI memberikan apresiasi atas capaian realisasi dalam TA 2021; 2) Terhadap program/kegiatan di TA 2021 yang tidak terealisasi, Komisi V DPR RI meminta Kementerian PUPR agar permasalahan dan kendala teknis pada pelaksanaan program/kegiatan TA 2021 dapat diselesaikan sehingga tidak terulang lagi pada TA 2022; 3) Komisi V DPR RI meminta Kementerian PUPR untuk melakukan: a. perbaikan infrastruktur yang rusak akibat bencana alam; b. peningkatan pengawasan dalam pembangunan Jalan Tol; dan	

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p>c. penambahan program padat karya dengan memanfaatkan sisa lelang tahun 2022.</p> <p>4) Komisi V DPR RI meminta Kementerian PUPR untuk segera melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 38 tahun 2004 tentang Jalan dan Undang-undang Nomor 17 tahun 2019 tentang Sumber Daya Air di antaranya mempercepat penyusunan Peraturan Pemerintah maupun Peraturan Menteri.</p> <p>5) Komisi V DPR RI mendorong Kementerian PUPR untuk mengutamakan produksi dalam negeri pada pembangunan infrastruktur.</p> <p>6) Komisi V DPR RI akan mengadakan rapat gabungan dengan Komisi dan Kementerian/Lembaga terkait untuk membahas:</p> <p>a. penanggulangan bencana alam;</p> <p>b. pengadaan barang dan jasa.</p>	

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
3.	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	Rapat Kerja tgl 26 Jan 2022; Dengan agenda: 1. Evaluasi Pelaksanaan APBN TA 2021; 2. Membahas program Kerja Tahun Anggaran 2022 Kementerian Perhubungan; 3. Lain-lain	1. Raker dilaksanakan secara fisik & virtual. 2. <u>Kesimpulan:</u> 1) Terkait dengan evaluasi pelaksanaan anggaran Kementerian Perhubungan, Komisi V DPR RI memberikan apresiasi atas capaian realisasi dalam TA 2021; 2) Terhadap program/kegiatan di TA 2021 yang tidak terealisasi, Komisi V DPR RI meminta Kementerian Perhubungan agar permasalahan dan kendala teknis pada pelaksanaan program/kegiatan TA 2021 dapat diselesaikan sehingga tidak terulang lagi pada TA 2022; 3) Komisi V DPR RI meminta Kementerian Perhubungan antara lain untuk : a. meningkatkan sarana dan prasarana pelabuhan, bandara, terminal bus dan stasiun kereta api; b. menambah kuantitas perlengkapan jalan; c. meningkatkan pengawasan yang ketat terhadap	

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p>kendaraan <i>Over Dimension Over Load</i> (ODOL);</p> <p>d. menambah program padat karya dengan memanfaatkan sisa lelang TA 2022; dan</p> <p>e. memprioritaskan penyelesaian program/kegiatan di tahun berjalan.</p> <p>4) Komisi V DPR RI sepakat dengan Kementerian Perhubungan untuk melakukan pendalaman lebih lanjut terkait Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di Kementerian Perhubungan.</p>	
4.	KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK PENGAWASAN BIDANG PUPR	<p>Kunfik tgl 27 s. 29 Jan 22:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Meninjau pembangunan Bendungan Pamukkulu - Meninjau pembangunan SPAM Bandar Lampung - Meninjau pembangunan Jalan Tol Semarang-Demak 	<p>a. Peninjauan Bendungan Pamukkulu, Kabupaten Takalar, Provinsi Sulsel, salah satu yang menjadi permasalahan adalah pembebasan lahan, Komisi V DPR RI meminta agar diselesaikan dengan adil dan transparan sehingga penyelesaian pembangunan bendungan dapat tepat waktu dan dapat bermanfaat bagi masyarakat sekitar.</p> <p>b. Peninjauan SPAM Bandar Lampung, yang dibangun dengan pola kerja sama Pemerintah dan</p>	

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p>Badan Usaha (KPBU) dan sudah dibangun sejak tahun 2020. Pembangunan SPAM ini sudah menelan biaya sebesar 1,3 Triliun. Komisi V DPR RI meminta agar skema pembiayaan ini dapat dilakukan secara transparan sehingga dapat dijadikan contoh untuk pembiayaan pembangunan infrastruktur ke depannya.</p> <p>c. Peninjauan Pembangunan Jalan Tol Semarang-Demak, Komisi V DPR RI meminta kepada Ditjen Bina Marga dan BPJT untuk meningkatkan pengawasan pekerjaan pembangunan Jalan Tol agar sesuai dgn standar dan kualitas konstruksi Jalan.</p>	
5.	SEKJEN, IRJEN, KEPALA BPSDM KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	<p>Rapat Dengar Pendapat tgl. 2 Feb 2022; Dengan agenda:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi Pelaksanaan APBN TA 2021; 2. Membahas program Kerja Tahun Anggaran 2022 untuk masing- 	<ol style="list-style-type: none"> 1. RDP dilaksanakan secara fisik & virtual. 2. <u>Kesimpulan:</u> <ol style="list-style-type: none"> 1) Terkait dengan evaluasi pelaksanaan anggaran Setjen, Itjen, BPSDM Kementerian PUPR, Komisi V DPR RI memberikan apresiasi atas capaian realisasi dalam TA 2021; 2) Terhadap program/kegiatan di TA 2021 yang tidak terealisasi, 	

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
		<p>masing Unit Eselon I Kemen PUPR; 3. Lain-lain.</p>	<p>Komisi V DPR RI meminta Setjen, Itjen, BPSDM Kementerian PUPR agar permasalahan dan kendala teknis pada pelaksanaan program/kegiatan TA 2021 dapat diselesaikan sehingga tidak terulang lagi pada TA 2022;</p> <p>3) Komisi V DPR RI menegaskan kembali kepada Sekretariat Jenderal untuk segera menyelesaikan penyusunan peraturan pelaksana UU No 17 Tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air;</p> <p>4) Komisi V DPR RI meminta Inspektorat Jenderal untuk meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan penggunaan TKDN (Tingkat Komponen Dalam Negeri) melalui penyusunan SOP dan peraturan tertulis dan melaporkan hasilnya kepada Komisi V DPR RI.</p> <p>5) Komisi V DPR RI meminta Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal dan BPSDM untuk:</p> <p>a. Meningkatkan koordinasi internal dengan setiap Unit Organisasi Eselon I;</p>	

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p>b. Meningkatkan fungsi pengendalian intern untuk meminimalisir temuan dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat;</p> <p>c. Mengoptimalkan pengelolaan manajemen aset di Kementerian PUPR;</p>	
6.	SEKJEN, IRJEN, KEPALA BALITBANG, KEPALA BPSDM-P KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	<p>Rapat Dengar Pendapat tgl. 3 Feb 2022; Dengan agenda:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi Pelaksanaan APBN TA 2021; 2. Membahas program Kerja Tahun Anggaran 2022 untuk masing-masing Unit Eselon I Kemen PUPR; 3. Lain-lain. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. RDP dilaksanakan secara fisik & virtual. 2. <u>Kesimpulan</u>: <ol style="list-style-type: none"> 1) Terkait dengan evaluasi pelaksanaan anggaran Setjen, Itjen, BALITBANG. dan BPSDM-P Kementerian Perhubungan, Komisi V DPR RI memberikan apresiasi atas capaian realisasi dalam TA 2021; 2) Terhadap program/kegiatan di TA 2021 yang tidak terealisasi, Komisi V DPR RI meminta Setjen, Itjen, BALITBANG. dan BPSDM-P Kementerian Perhubungan agar permasalahan dan kendala teknis pada pelaksanaan program/kegiatan TA 2021 dapat diselesaikan sehingga tidak terulang lagi pada TA 2022; 	

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p>3) Komisi V DPR RI meminta Sekretariat Jenderal agar melakukan kajian terhadap potensi sumber Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) secara lebih mendalam untuk meningkatkan PNBP di Kementerian Perhubungan.</p> <p>4) Komisi V DPR RI meminta Balitbang untuk meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait terhadap berubahnya status, tupoksi dari organisasi Balitbang yang berubah menjadi Badan Kebijakan Transportasi.</p> <p>5) Komisi V DPR RI meminta Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, BPSDMP dan Balitbang Kementerian Perhubungan untuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Meningkatkan fungsi pengendalian intern untuk meminimalisir temuan dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat; b. Mengoptimalkan pengelolaan manajemen aset di Kementerian Perhubungan; 	

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p>c. Meningkatkan koordinasi internal dengan setiap Unit Organisasi Eselon I sehingga hasil kajian, penelitian dan pengembangan lebih berperan dalam penetapan kebijakan strategis untuk meningkatkan keamanan, keselamatan dan kualitas layanan transportasi;</p> <p>d. Mengoptimalkan peran KNKT untuk meningkatkan keselamatan transportasi.</p> <p>6) Komisi V DPR RI meminta BPSDMP untuk memperhatikan penanganan Covid-19 di Perguruan Tinggi Vokasi dibawah Kementerian Perhubungan.</p>	
7.	RDPU/AUDIENSI DENGAN DEWAN PENGURUS NASIONAL INKINDO	<p>Audiensi tgl 3 Feb 2022 :</p> <p>Dengan agenda: Konsultasi permasalahan Badan Usaha Jasa Konsultansi Konstruksi</p>	<p>Beberapa poin penting sbb:</p> <p>a. Sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 12 UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah telah memberlakukan Peraturan Pelaksana, diantaranya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.</p> <p>b. Keinginan Pemerintah untuk membangkitkan Industri</p>	

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p>Konstruksi di Indonesia, terlebih ditengah Pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia, disambut baik oleh <i>stakeholders</i> dunia konstruksi antara lain para penyedia jasa konstruksi.</p> <p>c. Namun, masih terdapat beberapa hal yang masih dikeluhkan berkaitan dengan penyediaan jasa konstruksi, diantaranya masalah pemberdayaan Penyedia Jasa Konstruksi daerah yang dirasakan belum optimal, khususnya untuk kegiatan-kegiatan pembangunan infrastruktur nasional yang tersebar di berbagai provinsi.</p> <p>d. Untuk melaksanakan fungsi pengawasan, Komisi V DPR RI telah mengadakan Rapat Kerja dengan Menteri PUPR tanggal 25 Januari 2022 yang lalu, salah satu keputusannya, Komisi V akan mengundang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) pada masa sidang mendatang.</p>	

LAPORAN DWI MINGGUAN KOMISI VI

A. KEGIATAN FUNGSI LEGISLASI

-

B. KEGIATAN FUNGSI ANGGARAN

-

C. KEGIATAN FUNGSI PENGAWASAN

NO	INSTITUSI	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Seluruh Indonesia (GAPMMI), Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan (HIMKI), Persatuan Perusahaan Kosmetika Indonesia (PERKOSMI) dan Perhimpunan Perusahaan dan Asosiasi Kosmetika Indonesia (PPA KOSMETIKA INDONESIA)	Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi VI DPR RI Senin, 24 Januari 2022 a. Pelaksanaan Undang-Undang; b. Pelaksanaan Keuangan Negara; c. Kebijakan Pemerintah	Di dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) tersebut Komisi VI DPR RI selain menerima penjelasan dan aspirasi dari beberapa asosiasi tersebut, juga akan menyampaikan penjelasan tersebut kepada mitra terkait melalui Rapat Kerja dengan Menteri BUMN, Menteri Perdagangan, Menteri Investasi, Menteri Koperasi dan UKM Republik Indonesia.	

NO	INSTITUSI	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
2.	Kementerian BUMN	Rapat Kerja dengan Menteri BUMN RI, Selasa 25 Januari 2022 a. Pelaksanaan Undang-Undang; b. Pelaksanaan Keuangan Negara; c. Kebijakan Pemerintah	Dalam Rapat Kerja dengan Menteri BUMN ini Komisi VI DPR RI menerima penjelasan Menteri BUMN RI terkait progress holdingisasi BUMN dan mendorong peningkatan pengawasan terhadap program restrukturisasi BUMN-BUMN sehingga proses dan target yang hendak dicapai untuk menjadikan BUMN yang profesional, akuntabel, dan bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan dapat terukur melalui indikator yang jelas. Selain itu, Komisi VI DPR RI juga menerima penjelasan dari Menteri BUMN RI terkait kebutuhan pendanaan dalam rangka restrukturisasi PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. sebesar Rp. 7,5 Triliun. Atas kebutuhan tersebut, Komisi VI DPR RI mendorong Kementerian BUMN untuk mengajukan kebutuhan dana tersebut dalam Penyertaan Modal Negara Perubahan di Tahun 2022. Rapat Kerja ini juga meminta Kementerian BUMN dan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk terus melaporkan progress restrukturisasi utang kepada Komisi VI DPR RI serta meminta Kementerian BUMN RI untuk berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung RI untuk mengembalikan aset sitaan kasus ASABRI kepada ASABRI.	
3.	PT ASABRI (Persero) dan PT TASPEN (Persero)	Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR	<ul style="list-style-type: none"> • Komisi VI DPR RI meminta PT ASABRI (Persero) dan Kementerian BUMN RI berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan RI dalam upaya 	

NO	INSTITUSI	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
		<p>RI dengan Direktur Utama PT ASABRI (Persero) dan PT TASPEN (Persero) Selasa, 25 Januari 2022</p> <p>a. Pelaksanaan Undang-Undang; b. Pelaksanaan Keuangan Negara; c. Kebijakan Pemerintah</p>	<p>mendukung penyehatan PT ASABRI (Persero) terkait Penetapan Menteri Keuangan atas bunga aktuarial tahun 2022 dan <i>unfunded past service liability</i> (UPSL).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Komisi VI DPR RI meminta PT ASABRI (Persero) dan Kementerian BUMN RI untuk berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung RI dan Kementerian Keuangan RI untuk mengembalikan aset sitaan kasus PT ASABRI (Persero) kepada PT ASABRI (Persero). • Selain hal tersebut, Komisi VI turut mendukung penguatan program Tabungan Hari Tua (THT), dan rencana investasi dari PT ASABRI (Persero) dan PT TASPEN (Persero). • Untuk itu, Komisi VI DPR RI meminta penjelasan lebih lanjut atas program tersebut pada rapat selanjutnya. Komisi VI DPR RI juga meminta PT TASPEN (Persero) agar memastikan keberlangsungan Program Tabungan Hari Tua (THT) dan Akumulasi Iuran Pensiun (AIP), mendorong PT TASPEN (Persero) untuk melakukan pengelolaan manajemen investasi dan dana secara baik, transparan, profesional dengan prinsip kehati-hatian agar kasus serupa PT ASABRI (Persero) tidak terjadi di PT TASPEN (Persero). 	

NO	INSTITUSI	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
4.	PT Perkebunan Nusantara VI	Kunjungan Kerja Spesifik 27-29 Januari 2022 ke Provinsi Jambi a. Pelaksanaan Undang-Undang; b. Pelaksanaan Keuangan Negara; c. Kebijakan Pemerintah	<ul style="list-style-type: none"> • Komisi VI melaksanakan kunjungan kerja ke PT Perkebunan Nusantara VI di Provinsi Jambi, sebagai anak usaha BUMN perkebunan yang bergerak di sektor perkebunan dan pengolahan minyak kelapa sawit. • Kunjungan kerja ini dilaksanakan sebagai respon dan bentuk pengawasan Komisi VI DPR RI atas kenaikan harga minyak goreng yang terjadi di pasaran selama beberapa bulan terakhir. • Dalam kunjungan kerja hadir seluruh jajaran direksi PTPN VI, Direktur Umum PTPN III (Persero) Holding dan Asisten Deputi Bidang Perkebunan dan Kehutana Kementerian BUMN. • Dalam kunjungan kerja tersebut, jajaran direksi PTPN group menyampaikan perkembangan kinerja perusahaan sekaligus kapasitas usaha dalam memproduksi CPO sebagai bahan baku minyak goreng. • Diharapkan melalui kunjungan kerja ini, permasalahan kenaikan harga minyak sawit dapat teridentifikasi penyebabnya dengan baik untuk selanjutnya dapat disusun strategi penyelesaian atas permasalahan tersebut. 	

NO	INSTITUSI	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
5.	PT Perkebunan Nusantara V	Kunjungan Kerja Spesifik 27-29 Januari 2022 ke Provinsi Riau a. Pelaksanaan Undang-Undang; b. Pelaksanaan Keuangan Negara; c. Kebijakan Pemerintah	<ul style="list-style-type: none"> • Komisi VI DPR RI Tinjau Kapasitas Produksi Kelapa Sawit di Riau. Dalam rangka melakukan peninjauan terkait kapasitas produksi kelapa sawit untuk mendukung ketersediaan produksi minyak goreng dan turunannya, termasuk permasalahan dan kendala yang dihadapi beserta upaya penanganannya, Komisi VI DPR RI melakukan kunjungan kerja spesifik ke PT Perkebunan Nusantara V di Provinsi Riau. • Dalam paparannya, Direktur Utama PTPN V, Djatmiko menyebutkan PTPN V akan memastikan optimalisasi produksi CPO sawit rakyat dengan tidak hanya berfokus kepada pengembangan petani plasma binaan, melalui 4 program PTPN untuk Sawit Rakyat, Korporasi juga mendorong peningkatan produktivitas petani swadaya melalui penyediaan bibit unggul dan pemberdayaan KUD menjadi calon mitra teknis para petani. Kunjungan Kerja Spesifik dalam rangka mencari tahu ketersediaan produksi minyak goreng dan turunannya. 	
6.	PT Perkebunan Nusantara II, PT Perkebunan Nusantara III dan PT	Kunjungan Kerja Spesifik 27-29 Januari 2022 ke	<ul style="list-style-type: none"> • Dalam rangka melakukan peninjauan terkait kapasitas produksi kelapa sawit untuk mendukung ketersediaan produksi minyak goreng dan turunannya, termasuk permasalahan dan kendala yang dihadapi 	

NO	INSTITUSI	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
	Perkebunan Nusantara IV	Provinsi Sumatera Utara a. Pelaksanaan Undang-Undang; b. Pelaksanaan Keuangan Negara; c. Kebijakan Pemerintah	beserta upaya penanganannya, Komisi VI DPR RI melakukan kunjungan kerja spesifik ke PT Perkebunan Nusantara II, PT Perkebunan Nusantara III dan PT Perkebunan Nusantara IV di Provinsi Sumatera Utara. • Dalam paparannya, Direktur Utama PTPN III, Bapak Mohammad Abdul Ghani menyebutkan PTPN II, PTPN III dan PTPN IV akan memastikan optimalisasi produksi CPO sawit rakyat dengan tidak hanya berfokus kepada pengembangan petani plasma binaan, melalui 4 program PTPN untuk Sawit Rakyat, Korporasi juga mendorong peningkatan produktivitas petani swadaya melalui penyediaan bibit unggul dan pemberdayaan KUD menjadi calon mitra teknis para petani.	
7.	Kementerian Perdagangan RI	Rapat Kerja Komisi VI DPR RI dengan Menteri Perdagangan, Senin 31 Januari 2022. a. Pelaksanaan Undang-Undang;	• Komisi VI DPR RI lakukan Rapat Kerja dengan Menteri Perdagangan RI. Rapat Kerja ini dilakukan dalam rangka membahas terkait pembahasan mengenai stabilisasi harga minyak goreng dan komoditas lainnya. • Dalam Raker tersebut Komisi VI DPR RI mendesak Kementerian Perdagangan untuk melaksanakan pengawasan secara ketat dan penegakan hukum terhadap pelaksanaan program operasi pasar minyak goreng sesuai harga yang ditentukan untuk mencegah penimbunan komoditas oleh oknum yang	

NO	INSTITUSI	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
		b. Pelaksanaan Keuangan Negara; c. Kebijakan Pemerintah	tidak bertanggungjawab serta memastikan ketersediaan minyak goreng di pasaran. • Selain itu Komisi VI DPR RI juga mendorong Kementerian Perdagangan untuk berkoordinasi dengan stakeholders terkait dalam pelaksanaan program pengadaan dan distribusi pupuk bersubsidi secara merata serta melakukan pengawasan secara ketat agar pupuk bersubsidi dapat terdistribusi dengan baik dan tepat sasaran.	
8.	Kementerian Investasi/BKPM	Rapat Kerja Komisi VI DPR RI dengan Menteri Investasi/ Kepala BKPM, Senin 31 Januari 2022. a. Pelaksanaan Undang-Undang; b. Pelaksanaan Keuangan Negara; c. Kebijakan Pemerintah	• Komisi VI DPR RI mendorong Kementerian Investasi/BKPM untuk meneruskan kegiatan penerbitan dan pembagian NIB bagi pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) Perseorangan pada tahun 2022 guna mensosialisasikan fitur dan kemudahan OSS berbasis Risiko kepada masyarakat di daerah. • Tidak hanya itu, Komisi VI DPR RI juga mendesak Kementerian Investasi/BKPM tidak hanya memfasilitasi permasalahan investasi besar, tetapi juga investasi menengah dan kecil, serta mendorong Kementerian Investasi/BKPM untuk mengimplementasikan tingkat penyerapan TKDN secara ketat sesuai ketentuan.	

NO	INSTITUSI	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
9.	Asosiasi Apotek Indonesia dan Gabungan Pengusaha Farmasi.	RDPU Komisi VI DPR RI dengan Asosiasi Apotek Indonesia dan Gabungan Pengusaha Farmasi, Rabu 2 Februari 2022. a. Pelaksanaan Undang-Undang; b. Pelaksanaan Keuangan Negara; c. Kebijakan Pemerintah	<ul style="list-style-type: none"> Komisi VI DPR RI menerima penjelasan dan aspirasi dari Asosiasi Apotek Indonesia dan Gabungan Pengusaha Farmasi mengenai ketersediaan obat-obatan dalam rangka mengantisipasi varian Omicron dan akan menyampaikan penjelasan tersebut kepada mitra terkait melalui Rapat Kerja dengan Menteri BUMN, Menteri Investasi, Menteri Perdagangan dan Menteri Koperasi dan UKM RI. 	
10.	BUMN Holding Ultra Mikro (BRI, Pegadaian dan PMN) D.I Yogyakarta	Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI DPR RI ke D.I Yogyakarta, 3-5 Februari 2022. a. Pelaksanaan Undang-Undang;	<ul style="list-style-type: none"> Komisi VI DPR RI melakukan kunjungan kerja spesifik ke D.I Yogyakarta dalam rangka meninjau pelaksanaan ultra mikro yang dilaksanakan oleh BUMN Holding Ultra Mikro. Dalam kunjungan kerja ini, Komisi VI DPR RI mendorong BUMN Holding Ultra Mikro agar menjadi garda terdepan dalam pembiayaan permodalan untuk UMKM dan ultra mikro, sehingga pelaku usaha mikro tidak terjebak pada sistem pembiayaan informal yang justru akan memberatkan pelaku usaha dalam 	

NO	INSTITUSI	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
		b. Pelaksanaan Keuangan Negara; c. Kebijakan Pemerintah	mengembalikan dana yang dipinjam karena bunga yang tinggi. • Selain itu, Komisi VI DPR RI juga mendorong elaborasi antarentitas ketiga perusahaan holding ultra mikro untuk mengoptimalkan program yang telah dicanangkan. Untuk itu, besar harapan Komisi VI kepada BUMN Holding Ultra Mikro untuk terus melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, sehingga produk-produk pembiayaan ultra mikro familiar di masyarakat.	
11.	BUMN Holding Ultra Mikro (BRI, Pegadaian dan PMN) Jawa Timur	Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI DPR RI ke Jawa Timur, 3-5 Februari 2022. a. Pelaksanaan Undang-Undang; b. Pelaksanaan Keuangan Negara; c. Kebijakan Pemerintah	• Komisi VI DPR RI melakukan Kunjungan Kerja Spesifik dengan PT. BRI (Persero), Tbk, PT. Pegadaian (Persero), PT. Permodalan Nasional Madani (PMN) ke Provinsi Jawa Timur dalam membahas perkembangan terbentuknya holding Ultra Mikro. • Dalam dialog itu Komisi VI DPR RI mengatakan bahwa terbentuknya holding Ultra Mikro dampaknya belum secara nyata dirasakan oleh masyarakat. • Komisi VI DPR menginginkan langkah konkrit Holding Ultra Mikro untuk menurunkan bunga pinjaman rakyat agar semakin banyak rakyat menikmati dampak terbentuknya holding Ultra Mikro. • Komisi VI DPR RI mendesak agar Holding Ultra Mikro segera secara nyata memberikan	

NO	INSTITUSI	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p>bunga pinjaman yang terjangkau sebanyak banyaknya rakyat Indonesia.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pinjaman dengan Bunga yang terjangkau menjadi salah satu tujuan utama dibentuknya Holding Ultra Mikro. 	
12.	BUMN Holding Ultra Mikro (BRI, Pegadaian dan PMN) Jawa Tengah	<p>Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI DPR RI ke D.I Yogyakarta, 3-5 Februari 2022.</p> <p>a. Pelaksanaan Undang-Undang;</p> <p>b. Pelaksanaan Keuangan Negara;</p> <p>c. Kebijakan Pemerintah</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI DPR RI ke Jawa Tengah pada tanggal 3-5 Februari 2022 untuk meninjau pelaksanaan ultra mikro. • Dalam dialog itu Komisi VI DPR RI mengatakan bahwa terbentuknya holding Ultra Mikro dampaknya belum secara nyata dirasakan oleh masyarakat. • Holding ultra mikro diharapkan mampu memperluas jangkauan, memajukan inklusi keuangan, menjadi medium pembiayaan berkelanjutan serta membantu pelaku usaha yang belum memiliki akses ke sumber pendanaan formal, mengingat kontribusi usaha mikro sangat besar. 	

LAPORAN DWI MINGGUAN KOMISI VII

A. KEGIATAN FUNGSI LEGISLASI

-

B. KEGIATAN FUNGSI ANGGARAN

-

C. KEGIATAN FUNGSI PENGAWASAN

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	a. Dirjen AGRO Kemenperin RI b. Ketum AGRI menghadirkan 11 Dirut anggota AGRI	a. Pelaksanaan undang-undang; b. Pelaksanaan Keuangan Kegara; c. Kebijakan Pemerintah	a. Penetapan kuota impor raw sugar untuk gula rafinasi Tahun 2022 b. Penjelasan Dirjen Agro Kemenperin tentang Evaluasi terhadap 11 perusahaan Anggota AGRI penerima kuota impor	
2.	a. Ketua Umum Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI) b. Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN)	a. Pelaksanaan undang-undang; b. Pelaksanaan keuangan Negara; c. Kebijakan Pemerintah	Rencana Penetapan Wilayah Upaya peningkatan pendapatan negara dari sektor batubara	
3.	a. Kepala BRIN; b. Direktur Utama PT Bio Farma (Persero);	a. Pelaksanaan undang-undang;	a. Penjelasan Proses Integrasi LBM Eijkman dan PP IPTEK	

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
		<ul style="list-style-type: none"> b. Pelaksanaan Keuangan Negara; c. Kebijakan Pemerintah 	<ul style="list-style-type: none"> b. Penjelasan Perkembangan Vaksin Merah Putih c. Penjelasan atas rencana produksi Vaksin BUMN 	
4.	<ul style="list-style-type: none"> a. Dirjen IKFT Kementerian Perindustrian RI, b. Dirjen Minerba Kementerian ESDM RI, c. Ketua Asosiasi Semen Indonesia 	<ul style="list-style-type: none"> a. Pelaksanaan undang-undang; b. Pelaksanaan Keuangan Negara; c. Kebijakan Pemerintah 	<ul style="list-style-type: none"> a. Pasokan Batubara untuk industri semen b. Tata niaga semen 	
5.	Dirut PT PLN (Persero)	<ul style="list-style-type: none"> a. Pelaksanaan undang-undang; b. Pelaksanaan Keuangan Negara; c. Kebijakan Pemerintah 	<ul style="list-style-type: none"> a. Program prioritas PT PLN (Persero) Tahun 2022 b. Penjelasan kondisi pasokan energi primer untuk pembangkit-pembangkit listrik c. Roadmap netral karbon Tahun 2060 	
6.	Dirjen Minerba Kementerian ESDM RI	<ul style="list-style-type: none"> a. Pelaksanaan undang-undang; b. Pelaksanaan Keuangan Negara; c. Kebijakan Pemerintah 	<ul style="list-style-type: none"> a. Kebijakan penambangan pasir laut dari sisi Ditjen Minerba b. Potensi sumber daya dan prospek penambangan pasir laut bagi perekonomian nasional 	

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
7.	Kunjungan Kerja Spesifik pada Masa Persidangan III Tahun Sidang 2021-2022	<ul style="list-style-type: none"> a. Pelaksanaan undang-undang; b. Pelaksanaan Keuangan Negara; c. Kebijakan Pemerintah 	<p>Kunjungan kerja spesifik ke Provinsi Bali:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Peninjauan ke Pabrik minyak kutus kutus di Kabupaten Gianyar b. Peninjauan ke TBBM Pertamina Sanggaran Kota Denpasar c. Peninjauan PLTS 1 MWp, Kabupaten Karangasem 	
8.	Dirjen Industri Kecil, Menengah dan Aneka (IKMA_ Kementerian Perindustrian	<ul style="list-style-type: none"> a. Pelaksanaan undang-undang; b. Pelaksanaan Keuangan Negara; c. Kebijakan Pemerintah 	<ul style="list-style-type: none"> a. Penjelasan terkait produktivitas IKMA selama masa pandemic b. Penjelasan program IKMA yang berkaitan langsung dengan masyarakat. 	
9.	Direktur Utama MIND ID menghadirkan Dirut Sub Holding	<ul style="list-style-type: none"> a. Pelaksanaan undang-undang; b. Pelaksanaan Keuangan Negara; c. Kebijakan Pemerintah 	<ul style="list-style-type: none"> a. Evaluasi kinerja Tahun 2021 b. Program strategis Tahun 2022 	
10.	Menteri Perindustrian RI	<ul style="list-style-type: none"> a. Pelaksanaan undang-undang; b. Pelaksanaan Keuangan Negara; c. Kebijakan Pemerintah 	<ul style="list-style-type: none"> a. Program Kementerian Perindustrian Tahun 2022 yang terkait dengan aspirasi masyarakat dan evaluasi kinerja Kementerian Perindustrian Tahun 2021 	

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<ul style="list-style-type: none"> b. Kontribusi sector industry terhadap PDB Tahun 2021 c. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 25 Tahun 2021 tentang Pendoman dan Tata Cara Pengawasan dan Pengendalian Industri d. Progres Making Indonesia 4.0 e. Progres Industrialisasi dan Hilirisasi Nikel f. Penjelasan terkait kuota impor neraca komoditas 	
11.	Kepala SKK Migas	<ul style="list-style-type: none"> a. Pelaksanaan undang-undang; b. Pelaksanaan keuangan negara; c. Kebijakan pemerintah 	<ul style="list-style-type: none"> a. Pencapaian dan kinerja industry hulu Migas 2021 b. Investasi bidang eksplorasi 2021 dan prognosa c. Upaya untuk mengendalikan <i>capital outflow</i> Chevron, Conoco Philips dan Shell 	
12.	Kunjungan Kerja Spesifik pada Masa Persidangan III Tahun Sidang 2021-2022	<ul style="list-style-type: none"> a. Pelaksanaan undang-undang; b. Pelaksanaan keuangan negara; c. Kebijakan pemerintah 	Kunjungan kerja spesifik ke Provinsi Sumatera Utara: <ul style="list-style-type: none"> a. Peninjauan ke Titik Serah Transmisi Gas Bumi di Belawan 	

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			b. Peninjauan ke PT Kawasan Industri Medan di Kabupaten Deli Serdang c. Peninjauan PT Inalum di Kuala Tanjung Kabupaten Batubara	

LAPORAN DWI MINGGUAN KOMISI VIII

A. KEGIATAN FUNGSI LEGISLASI

-

B. KEGIATAN FUNGSI ANGGARAN

NO	INSTITUSI	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	Kementerian Agama RI	Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI dengan Menteri Agama RI mengenai Evaluasi Pelaksanaan APBN TA 2021 dan Pelaksanaan APBN TA 2022	<ul style="list-style-type: none"> Komisi VIII DPR RI dapat memahami realisasi anggaran Kementerian Agama RI Tahun 2021 sebesar Rp68.582.713.891.623,- (<i>enam puluh delapan triliun lima ratus delapan puluh dua miliar tujuh ratus tiga belas juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu enam ratus dua puluh tiga rupiah</i>) atau 99,52% dari total anggaran sebesar Rp68.912.328.497.000,- (<i>enam puluh delapan triliun sembilan ratus dua belas miliar tiga ratus dua puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah</i>) 	Akan ada pendalaman dengan Eselon I Kementerian Agama RI untuk membahas lebih jauh mengenai anggaran Kementerian Agama RI Tahun 2022

NO	INSTITUSI	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<ul style="list-style-type: none"> Komisi VIII DPR RI dapat memahami Pagu Anggaran Kementerian Agama RI Tahun 2022 sebesar Rp66.453.208.486.000,- (<i>enam puluh enam triliun empat ratus lima puluh tiga miliar dua ratus delapan juta empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah</i>) dan mendukung Kementerian Agama RI untuk mengoptimalkan realisasi anggaran dalam pencapaian program yang telah direncanakan 	

C. KEGIATAN FUNGSI PENGAWASAN

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	Kementerian Agama RI	Panitia Kerja mengenai Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) Tahun 1443 H/2022 M	a. Panja Komisi VIII DPR RI dan Panja Pemerintah RI sepakat untuk menyusun skenario pelaksanaan Ibadah Haji Tahun 1443 H/20222 M.	Perlu komunikasi, koordinasi dan diplomasi yang kuat untuk memastikan bahwa Ibadah Haji Tahun 1443 H/2022 M dapat dilaksanakan tahun ini.

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			b. Panja Komisi VIII DPR RI dan Panja Pemerintah RI bersepakat untuk menghitung setiap komponen dalam pelaksanaan Ibadah Haji Tahun 1443 H/2022 M di tengah meningkatnya penyebaran varian baru Covid-19, Omicron.	
2.	Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VIII DPR RI ke Kota Padang (Sumbar) dan Kota Surabaya (Jatim)	Asrama Haji Padang dan Asrama Haji Surabaya	Komisi VIII DPR RI ingin memastikan bahwa Asrama Haji Padang dan Asrama Haji Surabaya sudah menyiapkan segala sesuatunya apabila Ibadah Haji Tahun 1443 H/2022 M jadi dilaksanakan pada tahun ini.	

LAPORAN DWI MINGGUAN KOMISI IX

A. KEGIATAN FUNGSI LEGISLASI

NO	JUDUL RUU	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	RUU tentang Pengawasan Obat dan Makanan	Panja menugaskan tim asistensi untuk mempersiapkan pendalaman substansi RUU sesuai masukan anggota Panja.	<ul style="list-style-type: none"> Tidak ada kegiatan Panja 	<ul style="list-style-type: none"> Panja akan melakukan pembahasan draft RUU tentang Pengawasan Obat dan Makanan pada Masa Persidangan III TS 2021-2022.

B. KEGIATAN FUNGSI ANGGARAN

NO	INSTITUSI	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	Kementerian/Lembaga	Rapat pembahasan rencana kerja dan anggaran.	Tidak ada
2.	Badan Anggaran	a. Pembahasan alokasi anggaran kementerian/lembaga; b. Pembahasan RUU Pertanggungjawaban pelaksanaan APBN.	Tidak ada

C. KEGIATAN FUNGSI PENGAWASAN

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	Rapat Dengar Pendapat dengan Kementerian Ketenagakerjaan, Kamis, 24 Januari 2021	<p>Tiga agenda pembahasan;</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. penjelasan tentang tindak lanjut putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020 sehubungan dengan dinyatakan UU No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Inkonstitusional Bersyarat 2. penjelasan tentang Penetapan Upah Minimum (UM) Tahun 2022 sehubungan dengan berbagai penolakan pekerja/buruh 3. penyelesaian MoU penempatan Pekerja Migran Indonesia ke negara Malaysia, Arab Saudi, Jepang, Korea Selatan, Hongkong, Taiwan, dan negara penempatan tujuan lainnya 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kementerian Ketenagakerjaan agar berperan aktif bersama KIL yang lain dalam rangka memperbaiki aspek formil UU Cipta Kerja sebagaimana putusan Mahkamah Konstitusi No.091/PUU-XVIII/2020 dan melibatkan seluruh stakeholderterkait 2. Kementerian Ketenagakerjaan RI agar melakukan pemantauan sehubungan dengan formula penetapan upah minimum yang telah menimbulkan kontroversi dan penolakan diberbagai daerah dan selanjutnya dilaporkan ke Komisi IX DPR RI. 3. Kementerian Ketenagakerjaan RI agar mensosialisasikan- secara massif struktur dan skala upah berbasis produktifitas 4. Kementerian Ketenagakerjaan RI melindungi Pekerja Migran Indonesia (PMI) dengan ; 	

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<ul style="list-style-type: none"> a. berkordinasi aktif lintas KIL dan KSRI di negara-negara tertentu dalam penanganan masalah PMI; b. mendorong pemberdayaan ekonomi bagi PMI yang dipulangkan akibat pandemi Covid-19 atau dipulangkan habis kontrak; c. mempercepat progress MoU (Memorandum of Understanding) dengan negara penempatan Pekerja Migran Indonesia berdasarkan UU Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia 	
2.	Rapat Kerja dengan Menteri Kesehatan RI dan RDP dengan Dirut BPJS Kesehatan dan Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN), 25 Januari 2022	Penjelasan terkait perkembangan peninjauan manfaat jaminan kesehatan sesuai Kebutuhan Dasar Kesehatan (KDK) dan Kelas Rawat Inap Standar.	<ul style="list-style-type: none"> 1. Demi memastikan peninjauan manfaat JKN berbasis Kebutuhan Dasar Kesehatan (KDK) dapat berjalan dengan baik, Komisi IX DPR RI mendesak Kementerian Kesehatan RI untuk memperhatikan masukan dari anggota Komisi IX, yaitu: <ul style="list-style-type: none"> a. Memastikan kecukupan dan kompetensi Sumber Daya 	

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p>Manusia Kesehatan (SDMK), kelengkapan sarana prasarana pelayanan kesehatan termasuk obat dan alat kesehatan yang dibutuhkan di fasilitas kesehatan;</p> <p>b. memperjelas tanggung jawab dan kewenangan pelaksanaan antara Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) dan Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) dalam layanan promotif preventif di program JKN; dan</p> <p>c. Menyusun skema pembiayaan paket manfaat skrining dalam JKN agar tidak terjadi pembiayaan ganda antara program promotif preventif yang dianggarkan dalam APBN.</p> <p>2. Dalam melakukan peninjauan Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) dalam program JKN, Komisi IX DPR RI mendesak Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) untuk:</p>	

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p>a. bersama-sama dengan Kementerian Kesehatan RI, BPJS Kesehatan, dan asosiasi rumah sakit secara kontinu untuk memperjelas definisi dan kriteria KRIS dengan mempertimbangkan infrastruktur, Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK), dan alat kesehatan yang dimiliki oleh fasilitas kesehatan; dan</p> <p>b. Menyusun pentahapan implementasi KRIS dan mitigasi risikonya melalui peta jalan secara rinci.</p> <p>3. Demi sustainabilitas program JKN, Komisi IX DPR RI mendesak BPJS Kesehatan agar meningkatkan mutu layanan bagi peserta JKN melalui:</p> <p>a. memperkuat sistem pengendalian kecurangan (fraud) JKN di fasilitas kesehatan, dan BPJS Kesehatan; dan</p> <p>b. bersama-sama dengan Kementerian Kesehatan RI menghitung proyeksi opsi</p>	

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p>pembiayaan promotive-preventif dari Dana Jaminan Sosial (DJS).</p> <p>4. Komisi IX DPR RI mendesak Kementerian Kesehatan RI, DJSN dan BPJS Kesehatan untuk mempersiapkan sistem dan mekanisme Koordinasi Antar Penyelenggara Jaminan (KAPJ) antara Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dengan Asuransi Kesehatan Tambahan (AKT), khususnya dalam kerangka pelaksanaan peninjauan Kebutuhan Dasar Kesehatan (KDK) dan Kelas Rawat Inap Standar (KRIS).</p> <p>5. Dalam melakukan penyusunan Kebutuhan Dasar Kesehatan (KDK) dan Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) Komisi IX DPR RI mendesak agar Kementerian Kesehatan RI, DJSN dan BPJS Kesehatan untuk melakukan konsultasi publik secara intensif, termasuk melibatkan Komisi IX DPR RI, sebagai bagian dari proses penyusunan kebijakan yang akuntabel.</p>	

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p>6. Komisi IX DPR RI mendesak Kementerian Kesehatan RI, Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) dan BPJS Kesehatan bersama BPJS Kesehatan mengambil kebijakan strategis dan konkrit dalam penanggulangan penyakit katastropik melalui:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. pemenuhan infrastruktur kesehatan termasuk Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) untuk pelayanan spesialis dan subspecialis di seluruh wilayah Indonesia; b. memastikan ketersediaan obat bagi seluruh peserta JKN melalui Formularium Nasional (Fornas) dan addendumnya; b. pemerataan distribusi SDMK di Puskesmas; c. penyelesaian Panduan Nasional Praktik Kedokteran (PNPK) sebagai acuan standar pelayanan kesehatan. 	

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
3.	RDP dengan Kepala BKKBN, Dirjen Kesmas Kemenkes RI, 31 Januari 2022	Penjelasan tentang percepatan penurunan Stunting sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021, terutama di masa pandemi COVID-19.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komisi IX DPR RI mendesak BKKBN RI sebagai Ketua Pelaksana Percepatan Penurunan Stunting untuk: <ol style="list-style-type: none"> a. meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi strategi penurunan stunting antar kementerian/lembaga sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting; dan b. membuat program yang inovatif untuk menurunkan stunting sebanyak 10,4% sebagai upaya pemenuhan target penurunan stunting menjadi 14% pada tahun 2024. 2. Komisi IX DPR RI mendesak Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan RI bersama-sama dengan BKKBN RI untuk: <ol style="list-style-type: none"> a. melakukan perencanaan, pelaksanaan, monitoring serta evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan intervensi spesifik dan 	

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p>intervensi sensitif sekaligus menetapkan proporsi anggarannya dengan melibatkan kementerian/lembaga terkait;</p> <p>b. segera merealisasikan pemenuhan alat kesehatan dan sumber daya manusia kesehatan yang diperlukan fasilitas layanan kesehatan untuk percepatan penurunan stunting; dan</p> <p>c. memastikan pemenuhan kesejahteraan dan kesehatan kader keluarga berencana, termasuk keikutsertaan dalam kepesertaan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.</p> <p>3. Komisi IX DPR RI mendesak BKKBN RI untuk memberikan data-data terkait percepatan penurunan stunting kepada Komisi IX DPR RI, antara lain:</p> <p>a. angka stunting di setiap kabupaten/kota dengan merinci daerah tertinggi dan terendah stunting; dan</p> <p>b. rincian kebutuhan anggaran penanganan stunting di setiap</p>	

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p>kabupaten/kota untuk tahun 2022; dan</p> <p>b. testimoni keberhasilan penanganan stunting dari berbagai daerah di kabupaten/kota</p> <p>4. Komisi IX DPR RI mendesak BKKBN RI dan Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan RI untuk terus meningkatkan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) dengan seluruh pemangku kepentingan yang terlibat dalam penanganan stunting.</p> <p>5. Komisi IX DPR RI meminta jawaban tertulis terhadap pertanyaan anggota Komisi IX DPR RI pada Rapat Dengar Pendapat hari ini dan diserahkan paling lambat tanggal 7 Februari 2022.</p>	

LAPORAN DWI MINGGUAN KOMISI X

A. KEGIATAN FUNGSI LEGISLASI

NO	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KET
1	24-26 Januari 2022 Rapat Panja RUU SKN (Konsinyering)	Agenda Membahas tanggapan Pemerintah terhadap hasil uji publik isu-isu krusial RUU SKN	Substansi yang belum ada kesepakatan yaitu kelembagaan KON-KOI , khususnya terkait usulan ketua KONI dan KOI dijabat satu orang yang sama.
2	2-4 Februari 2022 Rapat Panja RUU SKN (Konsinyering)	Agenda: Membahas pasal-pasal yang belum disepakati atau belum dibahas (selain isu krusial mayor dan minor)	Sudah selesai pembahasan sampai Pasal 35.
3	24-26 Januari 2022 Rapat Panja RUU PP (Konsinyering)	Agenda - Membahas substansi Pendidikan psikologi yang belum selesai - Membahas substansi layanan dan merumuskan normanya	Masih dalam proses pembahasan
4	2-4 Februari 2022 Rapat Panja RUU SKN (Konsinyering)	Agenda Membahas substansi layanan dan merumuskan normanya	Masih dalam proses pembahasan

B. KEGIATAN FUNGSI ANGGARAN

-

C. KEGIATAN FUNGSI PENGAWASAN

NO	INSTITUSI	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1	Kemendikbudristek	28-30 Januari 2022 Kunjungan kerja spesifik ke Kabupaten Bandung, Bandung Barat dan Depok	Melakukan pengawasan mengenai PTM, Pembiayaan PPPK, Sekolah Penggerak dan Guru Penggerak.	<p>Permasalahan dan Temuan di Kabupaten Bandung</p> <p><u>PPPK:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Nilai afirmasi (usia di atas 35 tahun, disabilitas, honorer K2, dan sertifikat pendidik), sedangkan masa kerja tidak jadi penambah nilai afirmasi 2. Guru Honorer di sekolah swasta yang lulus mengikuti seleksi PPPK akan meninggalkan sekolah asal yang mengakibatkan sekolah swasta akan kekurangan tenaga pendidik <p><u>PTM 100%:</u></p> <p>Penyelenggaraan PTM 100% di Kabupaten Bandung Barat menemui beberapa kendala minimnya dukungan dari penyedia transportasi umum dari rumah peserta didik ke sekolah dan sebaliknya yang menerapkan protokol Kesehatan</p>

NO	INSTITUSI	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
				<p><u>Guru Penggerak:</u> Adanya syarat menjadi Kepala Sekolah harus dari lulusan PGP dianggap tidak adil</p> <p><u>Sekolah Penggerak:</u> Ketidakmampuan sekolah untuk menyelenggarakan diagnostik tes, mengakibatkan harus melibatkan pihak ke 3 yang berbiaya mahal, seperti konsultan psikolog)</p> <p>Permasalahan dan temuan di Kabupaten Bandung Barat:</p> <p><u>PPPK:</u> Jumlah guru pensiun tahun 2022 sebanyak 1164 orang, dan akan terus bertambah untuk itu perlu formasi penerimaan rekrutmen Guru dan sampai saat ini pembiayaan Guru PPPK masih menggunakan dana APBD belum ada alokasi anggaran APBN melalui DAU.</p>

NO	INSTITUSI	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
				<p><u>PTM 100%:</u> masih ada orang tua tidak mengizinkan anaknya untuk mengikuti PTM, belum tercapainya capaian vaksinasi, dan penetapan leveling PPKM didasarkan pada capaian vaksinasi tingkat kabupaten seharusnya berdasarkan tingkat kecamatan.</p> <p><u>Sekolah Penggerak:</u> di Kabupaten Bandung belum ada sekolah yang ditetapkan sebagai Sekolah Penggerak</p> <p>Permasalahan dan temuan di Kota Depok: <u>PPPK:</u> Jadwal pelaksanaan rekrutmen tenaga guru PPPK tidak sesuai perencanaan, sehingga sering terjadi perubahan jadwal.</p> <p><u>PTM 100%:</u> Tingginya kasus harian covid-19 di lingkungan sekolah menyebabkan Pemerintah Kota Depok mengusulkan untuk</p>

NO	INSTITUSI	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
				<p>perlunya evaluasi pelaksanaan PTM 100 persen, untuk menekan laju penularan varian covid-19 yang dikhawatirkan terus meningkat.</p> <p><u>Sekolah Penggerak:</u> Kota Depok baru ditetapkan adanya sekolah penggerak tahun 2022, proses seleksi dan penetapan sekolah yang ditunjuk menjadi sekolah penggerak telah dilakukan.</p>
		<p>27 Januari 2022 Komisi X DPR RI menerima audiensi dari Forum Honorar Jatim, dan PGRI Jatim</p>	<p>Menyampaikan banyaknya guru-guru honorar yang sudah berhasil lulus <i>passing grade</i> tetapi faktanya tidak mendapatkan formasi;</p>	
		<p>27 Januari 2022 Komisi X DPR RI menerima audiensi forum Guru Honorar Negeri Lulus Passing Grade Seluruh Indonesia (FGHLPGSI), dengan perwakilan dari beberapa daerah.</p>	<p>Menyampaikan aspirasi agar guru Honorar di sekolah negeri yang telah mengikuti tes dan lulus <i>passing grade</i> pada tahun 2021 agar tidak perlu mengikuti test</p>	

NO	INSTITUSI	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			kembali dan langsung diberikan formasi serta ditempatkan.	
		2 Februari 2020 RDPU Panja MBKM Komisi X DPR RI dengan 1. BEM Universitas Gadjah Mada 2. BEM Universitas Negeri Padang 3. BEM Universitas Kristen Satya Wacana 4. BEM Universitas Kutai Kartanegara 5. BEM Universitas Indonesia 6. BEM Universitas Teknologi Sumbawa	Membahas Pandangan dan Tanggapan BEM terhadap implementasi Kebijakan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka (MBKM) dalam Perspektif Mahasiswa	Para Pengurus BEM mengharapkan ada pelibatan lebih optimal kepada BEM-BEM di perguruan tinggi dalam implementasi kebijakan MBKM
2	Kemenparekraf/ Baparekraf RI	24 Januari 2022 RAPAT KERJA KOMISI X DPR RI DENGAN MENPAREKRAF/ BAPAREKRAF RI Agenda: 1. Evaluasi program kerja TA 2021.	- Realisasi anggaran Kemenparekraf/Baparekraf RI pada APBN TA 2021 sebesar 95,76 %. - Komisi X DPR RI Mendorong Kemenparekraf/Baparekraf RI untuk	

NO	INSTITUSI	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
		2. Persiapan program kerja TA 2022. 3. Penyerahan laporan Panja Desa Wisata dan Kampung Tematik.	melakukan koordinasi dengan Kemenpora RI dan K/L lain terkait kebijakan karantina, khususnya dalam event olahraga dan pariwisata tahun 2022 seperti pelaksanaan MotoGP Mandalika 2022	

LAPORAN DWI MINGGUAN BADAN LEGISLASI (BALEG)

NO	AKD	PERKEMBANGAN KEGIATAN
1.	Badan Legislasi	<p>1. Rapat Kerja Badan Legislasi dengan Menteri Desa Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Hukum dan HAM, dan PPUU DPD RI dalam rangka Pembahasan RUU tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) (27 Januari 2022, pukul 13.00 WIB).</p> <p>2. Rapat Pleno Badan Legislasi dalam rangka mendengarkan penjelasan Pengusul Komisi II DPR RI terkait Harmonisasai 12 RUU tentang Provinsi (27 Januari, pukul 15.00 WIB).</p> <p>3. Rapat Pleno Badan Legislasi dalam rangka Harmonisasi RUU tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak (31 Januari 2022, pukul 13.00 WIB).</p> <p>4. Rapat Pleno Badan Legislasi dalam rangka membahas hasil kajian Harmonisasi 6 RUU tentang Provinsi (Provinsi Bali, Provinsi NTT, Provinsi NTB, Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Riau, dan Provinsi Jambi) (2 Februari 2022, pukul 10.00 WIB).</p> <p>5. Rapat Pleno Badan Legislasi dalam rangka penyusunan RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (2 Februari 2022, pukul 15.00 WIB).</p> <p>6. Rapat Panja Badan Legislasi dalam rangka penyusunan RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (3 Februari 2022, pukul 10.00 WIB).</p> <p>7. Rapat Panja Badan Legislasi dalam rangka membahas hasil kajian Harmonisasi 6 RUU tentang Provinsi (Provinsi Bali, Provinsi NTT, Provinsi NTB, Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Riau, dan Provinsi Jambi) (3 Februari 2022, pukul 15.00 WIB).</p>

LAPORAN DWI MINGGUAN BADAN KERJA SAMA ANTAR PARLEMEN (BKSAP)

NO	PIHAK	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	BKSAP - KSB	Pertemuan Wakil Ketua BKSAP DPR RI dengan Political Counselor Kedutaan AS	<p>Wakil Ketua BKSAP DPR RI Mardani Ali Sera menerima kunjungan Diplomat Kedutaan Besar Amerika Serikat Kyle Richardson. Pertemuan yang berlangsung di Gedung DPR RI tersebut membahas sejumlah hal terkait update perkembangan situasi politik di Indonesia saat ini, antara lain terkait rencana pemindahan Ibu Kota Negara, perkembangan pembahasan Pemilu serta berbagai RUU yang saat ini menjadi perhatian DPR RI dan masyarakat luas.</p> <p>Resmi bertugas di Indonesia per Juli 2021, Richardson sebelumnya bertugas sebagai Deputy Political Conselor di Kedutaan Amerika Serikat untuk Brasilia dan sebagai Deputy Director di EAP Office of Multilateral Affairs yang berfokus pada isu terkait ASEAN dan Laut Cina Selatan.</p>	Tgl. 24 Januari 2022
2.	BKSAP - ABA	BKSAP SDGs Day “Diplomasi Parlemen Sebagai Bagian dari Diplomasi Total Indonesia” di Kota Jambi, Provinsi Jambi.	<p>Dalam rangka sosialisasi diplomasi parlemen dan optimalisasi potensi daerah menuju pembangunan berkelanjutan, BKSAP DPR RI menggelar BKSAP SDGs Day dengan tema “Diplomasi Parlemen Sebagai Bagian dari Diplomasi Total Indonesia” di Kota Jambi, Provinsi Jambi.</p> <p>Delegasi dipimpin Ketua BKSAP Dr. H. Fadli Zon, S.S, M.Sc. (F. Partai Gerindra), dengan didampingi:</p>	Tgl. 24 Januari 2022

NO	PIHAK	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p>Wakil Ketua Ir. H. A. Hafisz Tohir (F. PAN), Fadhlullah, S.E. (F. Partai Gerindra), Hasbi Anshory, S.E., M.M. (F. NasDem)</p> <p>Delegasi BKSAP berdialog dengan Gubernur Jambi, Dr. H. Al Haris, S.Sos., M.H., beserta jajaran membahas potensi Provinsi Jambi yang dapat diangkat dalam forum parlemen Internasional. Pertemuan tersebut juga dihadiri oleh perwakilan civitas akademika dan mahasiswa dari Universitas Jambi, UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Universitas Muhammadiyah Jambi, dan Universitas Batanghari Jambi.</p>	
3.	BKSAP - KSB	Courtesy Call GKSB DPR RI – Parlemen Slowakia dengan Dubes	<p>GKSB DPR RI - Parlemen Slowakia mengadakan Courtesy Call dengan Dubes Slowakia untuk Indonesia, H.E. Jaroslav Chlebo yang dipimpin oleh Anggota GKSB DPR RI - Parlemen Slowakia, Prof. Hendrawan Supratikno (F-PDIP).</p> <p>Courtesy Call membahas potensi kerja sama sekaligus upaya penguatan hubungan persahabatan Indonesia - Slowakia. Kerja sama yang terjalin antara Indonesia-Slowakia mencakup berbagai sektor, diantaranya perdagangan, investasi, pertahanan, teknologi, dan sebagainya. Slowakia masih dipandang sebagai mitra strategis bagi Indonesia di Kawasan Eropa Tengah. Tentu terdapat banyak potensi bisnis yang belum dimanfaatkan antara Indonesia dan Slowakia di mana peluang besar ini diharapkan dapat dimanfaatkan.</p>	Tgl. 25 Januari 2022

NO	PIHAK	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p>Prof. Hendrawan menyampaikan bahwa situasi pandemi saat ini menghambat rencana GKSB DPR RI - Parlemen Slowakia untuk berkunjung, terutama dengan adanya varian baru Omicron. Kedua pihak juga mengharapkan adanya kerjasama dalam bidang penanganan pandemi serta bertukar pengalaman dalam penanganan pandemi agar kondisi kedua negara tersebut membaik.</p> <p>Terkait Sidang Umum IPU ke 144 yang rencananya akan digelar di Bali, Dubes bersedia untuk menyampaikan undangan kepada pimpinan Parlemen Slowakia.</p>	
4.	BKSAP - KSI	Rapat Koordinasi antara BKSAP DPR RI dengan Menko Marves	<p>Ketua BKSAP DPR RI, Dr. Fadli Zon; Wakil Ketua BKSAP DPR RI, Putu Supadma Rudana; didampingi jajaran Sekretariat Jenderal DPR RI, mengadakan rapat koordinasi dengan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi RI beserta jajarannya.</p> <p>Pertemuan yang diadakan di kantor Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Jakarta, ini membahas mengenai persiapan penyelenggaraan sidang IPU ke-144 di Nusa Dua, Bali tanggal 20-24 Maret 2022, dimana DPR RI akan menjadi tuan rumah.</p> <p>Koordinasi dilakukan terkait protokol kesehatan konferensi internasional agar penyelenggaraan sidang IPU dapat terlaksana dengan aman dan lancar.</p>	Tgl. 26 Januari 2022

NO	PIHAK	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
5.	BKSAP - KSR	Webinar “One-Year Anniversary of the Myanmar Coup” yang diselenggarakan European Parliament in ASEAN (EPinASEAN)	<p>Dr. Fadli Zon. S.S., M.Sc (F-PGerindra) Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI menjadi panelis dalam Webinar “One-Year Anniversary of the Myanmar Coup” yang diselenggarakan European Parliament in ASEAN (EPinASEAN).</p> <p>Panelis lainnya, Ranieri Sabatucci (Duta Besar Uni Eropa untuk Myanmar), Daw Myat Thida Htun (Member of the Committee Representing the Pyadaungsu Hluttaw), dan Aye Mint Tant (Journalist and Features Editor at Frontier Myanmar), dimoderatori James Maher (Senior Policy Adviser, Directorate-General for External Policies of the Union).</p> <p>Dr. Fadli Zon menyampaikan sejumlah pandangan. Pertama, terkait dampak krisis di Myanmar terhadap ASEAN, Indonesia menempatkan isu Myanmar sebagai salah satu agenda utama politik luar negeri dan diplomasi parlemen. DPR melalui BKSAP aktif berdiplomasi di ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA) untuk mencari solusi atas krisis di Myanmar dengan tetap menjunjung prinsip “<i>good neighbourhood policy</i>”.</p> <p>Kedua, terkait langkah ke depan bagi ASEAN, politisi Partai Gerindra Dapil Jawa Barat V ini menegaskan, DPR mendukung konsistensi posisi Pemerintah</p>	Tgl. 26 Januari 2022

NO	PIHAK	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p>Indonesia mengupayakan implementasi lima poin konsensus ASEAN.</p> <p>Ketiga, terkait peran Aung San Suu Kyi untuk restorasi demokrasi di Myanmar, pergerakan demokrasi di Myanmar harus tetap berlanjut meski “tanpa” Aung San Suu Kyi. Pergerakan perlu diwakili oleh kekuatan demokratis baru yang lebih segar, progresif dan lebih siap dalam konfrontasi serta bersifat inklusif. Semoga akan muncul banyak democratic figure di Myanmar.</p> <p>Keempat, terkait masa depan Myanmar yang damai, demokratis dan inklusif, Ketua BKSAP menegaskan, hanya dapat terwujud apabila semua pihak seluruh masyarakat Myanmar termasuk kelompok etnis dan kaum minoritas yang selama ini termarginalkan, dilibatkan dalam perumusan konstitusi agar demokrasi dan inklusifitas Myanmar terlindungi.</p> <p>Menutup diskusi webinar, Dr. Fadli Zon meminta lima poin konsensus ASEAN ditegakkan dan mendorong pemerintah untuk mengimplementasikan.</p>	
6.	BKSAP - KSB	Diskusi dengan Kemlu dengan Tema: “Proyeksi Politik Luar Negeri	BKSAP DPR RI mengadakan diskusi dengan Kemlu RI dengan Tema: Proyeksi Politik Luar Negeri Republik Indonesia Tahun 2022. Diskusi dipimpin oleh Ketua BKSAP DPR RI, Dr. Fadli Zon (F-PGerindra) dan mengundang Wakil Menteri Luar	Tgl. 27 Januari 2022

NO	PIHAK	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
		Republik Indonesia Tahun 2022”	<p>Negeri Republik Indonesia, Mahendra Siregar beserta jajarannya. Diskusi juga diikuti oleh jajaran pimpinan, Anggota BKSAP DPR RI yg hadir secara fisik maupun virtual serta Wakil Walikota Bogor.</p> <p>Dalam kesempatan tersebut, Wamenlu memberikan paparan mengenai Refleksi Politik Luar Negeri 2021 dan Proyeksi Tahun 2022. Beliau menyampaikan bahwa Pandemi Covid - 19 dan rivalitas politik global telah menciptakan tantangan luar biasa bagi seluruh negara.</p> <p>Di dalam kondisi tersebut, Indonesia tetap berperan aktif sebagai pemimpin di panggung global, baik di forum bilateral, regional maupun multilateral.</p> <p>Di tahun 2022, diplomasi Indonesia akan difokuskan pada: Diplomasi Kesehatan, Diplomasi Ekonomi, Diplomasi Perlindungan, Diplomasi Perdamaian dan Kemanusiaan serta Diplomasi Kedaulatan.</p> <p>Dalam kesempatan ini, Wamenlu menyampaikan peran penting DPR RI di dalam Parliament20 (P20) yang merupakan Engagement Group yang memfasilitasi exchange of best practices dan informasi Parlemen negara anggota G20. P20 sendiri merupakan inisiatif dibawah Presidensi G20 Indonesia. Sehubungan dengan hal ini, BKSAP DPR</p>	

NO	PIHAK	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p>RI berperan sebagai pengawal kepentingan Indonesia dan Negara - negara berkembang dalam berbagai isu, termasuk perubahan iklim, pendidikan dan sosial budaya</p> <p>BKSAP DPR RI juga mengapresiasi hubungan baik serta penyampaian informasi oleh Kemlu RI dalam mendukung aktivitas diplomasi parlemen. Diharapkan sinergitas antara Kemlu dan BKSAP dapat terus berlanjut dan bermanfaat bagi kepentingan Indonesia.</p>	

LAPORAN DWI MINGGUAN MAHKAMAH KEHORMATAN DEWAN (MKD)

NO	JUDUL	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.		Kunjungan Kerja Dalam Negeri	Mahkamah Kehormatan Dewan telah melaksanakan kegiatan kunjungan kerja ke Kota Serang Provinsi Banten dalam rangka Sosialisasi Tugas dan Fungsi Mahkamah Kehormatan Dewan dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) Anggota DPR RI	
		Paket Meeting	Kegiatan Paket Meeting Mahkamah Kehormatan Dewan yang dilaksanakan di Wisma DPR RI Griya Sabha Kopo, Jawa Barat pada tanggal <ul style="list-style-type: none"> - 27 – 29 Januari 2022 bertema “Peran MKD dalam menjaga integritas DPR” dengan mengundang Giri Suprapdiono, S.T., MA. Dari Mabes Polri sebagai Narasumber - 31 Januari – 2 Februari 2022 bertema “Batasan Antara Perbuatan Pidana dan Etik dan Bagaimana Seharusnya Perilaku Anggota DPR di Media” dengan mengundang Ahmad Toriq selaku Redaktur Pelaksana Detikcom dan Pengacara Dzulfikar Adhiyatma Tarawe, S.H., M.H sebagai Narasumber 	

LAPORAN DWI MINGGUAN BADAN ANGGARAN (BANGGAR)

NO	INSTITUSI	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	Narasumber 1. Dr. Raden Pardede 2. Dr. Tauhid Ahmad (Direktur Eksekutif Indef)	Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) terkait Mempersiapkan APBN 2023 yang sehat dan kredibel menuju Defisit Anggaran dibawah 3%	<ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah juga perlu merumuskan kebijakan seperti apa yang perlu digunakan untuk memulihkan ekonomi dan mentransformasikan dari kebijakan ekonomi lama kepada kebijakan yang baru, dimana dukungan fiskal diperlukan untuk memfasilitasi transformasi ekonomi tersebut. • Tantangan riil tahun 2022 tidak ringan, Pemerintah perlu memastikan bahwa sejauh mana investasi swasta mulai meningkat untuk menggantikan fungsi fiskal pemerintah dalam mempertahankan pemulihan pertumbuhan ekonomi. Selain itu, hingga tahun 2021, faktor konsumsi masih sangat dominan untuk menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi. Konsumsi akan memicu dan mendorong investasi. Selain itu stimulus fiskal sebagai pemicu (<i>jump start</i>) untuk menggerakkan 	

NO	INSTITUSI	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p>pertumbuhan ekonomi selama krisis terjadi. Adapun program PEN yang sudah dijalankan, berguna untuk pemulihan sektor kesehatan, sosial, dan stimulus bagi sektor UMKM.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Untuk mencapai fiskal konsolidasi pada tahun 2023, diperlukan kerja keras dari seluruh <i>stakeholder</i> yang ada. Kebijakan perpajakan dan PNBPN harus mampu mendorong peningkatan penerimaan negara. Dengan demikian diharapkan, penerimaan akan lebih baik dan kembali seperti sebelum terjadinya pandemi. Pada saat yang sama, Pemerintah bisa memanfaatkan dampak positif dari harga komoditas yang masih tinggi. Sedangkan dari sisi belanja, diharapkan bisa kembali pada kondisi normal. Sehingga diharapkan pada APBN tahun 2023 sudah harus mencapai tingkat defisit di bawah 3%. • Dalam merumuskan kebijakan APBN 2023, khususnya terhadap kebijakan belanja negara. Pemerintah perlu memperhatikan beberapa kondisi global dan nasional, antara lain. Adanya Ketidakpastian Global (Inflasi 	

NO	INSTITUSI	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p>US, Omicron, perlambatan ekonomi Tiongkok), perlunya transformasi struktural (extra belanja) untuk <i>upgrade</i> keterampilan dan infrastruktur teknologi, Kewajiban <i>Contingency</i> (BUMN, infrastruktur, utang), serta melakukan fleksibilitas dalam Konsolidasi APBN. Diharapkan nanti Pemerintah memiliki antisipasi dalam menghadapi situasi tidak pasti baik secara global maupun domestik pada tahun 2023.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Terdapat beberapa tantangan pasca Covid-19 atau Post Covid-19 yang kemungkinan akan terjadi dan dialami oleh Indonesia. Antara lain: Pasca <i>commodity boom</i>, pendapatan berbasis SDA menurun; Perubahan struktur perekonomian dari manufaktur ke sektor jasa (sektor <i>informal-non-taxable</i>); Sistem dan administrasi perpajakan belum <i>compatible</i> dengan ICT; Perlu transformasi yang berkelanjutan. • Adapun agenda ke depan yang harus segera dirancang oleh Pemerintah adalah, antara lain: Mengembalikan 	

NO	INSTITUSI	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p>rasio utang terhadap PDB kembali pada batas aman (30% PDB) dan tahun 2023 merupakan titik puncak; Pengembangan basis investor dalam negeri serta memanfaatkan sumber utang luar negeri sebagai pelengkap; Perbaiki instrumen utang dengan memperhatikan tingkat biaya dan risiko, serta kebutuhan pasar; Meningkatkan efektifitas utang dengan meningkatkan belanja modal dan sektor produktif; Tetap melakukan reformasi perpajakan dan mengurangi ketergantungan dari “boom komoditas.</p>	
2.	<p>Narasumber 1. Prof. Dr. Ari Kuncoro (Rektor Universitas Indonesia) 2. Prof. Dr. A. Prasetyantoko (Rektor Universitas Atmajaya)</p>	<p>Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) terkait Menakar Pemulihan Ekonomi Tahun 2022: Peluang, Tantangan, dan Risiko</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Banyak tantangan di tahun 2022 dari mulai konflik energi sampai pada kenaikan harga komoditas yang tentunya akan memengaruhi kondisi ekonomi tahun 2023. • Tantangan paling pokok saat ini adalah <i>desrupted global recovery</i> di mana tantangan, peluang, dan risiko yang dihadapi tidak sama dengan proyeksi yang dibuat pada akhir tahun 2021. Hal ini terlihat dari pertumbuhan ekonomi global yang dikoreksi pada awal Januari 2022. 	-

NO	INSTITUSI	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<ul style="list-style-type: none">• Pada tahun 2022 sepertinya akan ada <i>supply desruption</i> sebagai dampak dari varian baru Covid-19 dan risiko perang Rusia vs Ukraina dan Amerika Serikat.• Menghadapi tahun 2022 tidak optimis namun tidak pesimis. Tetapi masalahnya lebih ke jangka panjang. Pasca pandemi pemerintah punya peran lebih baik karena situasi berubah, struktur ekonomi berubah. Fiskal harus memberi <i>signal</i> terkait perubahan tersebut. Fungsi fiskal adalah <i>investing for the future</i>. Fiskal harus menyokong jangka panjang terutama <i>investing in human capital</i>.	

LAPORAN DWI MINGGUAN BADAN URUSAN RUMAH TANGGA (BURT)

NO	KEGIATAN	PERKEMBANGAN	KETERANGAN
1.	Rapat BURT dengan Sekretariat Jenderal DPR RI Rabu, 26 Januari 2022 Agenda: Penyusunan Arah Kebijakan Umum Pengelolaan Anggaran (AKUPA) DPR RI Tahun 2023	<ol style="list-style-type: none"> 1) Penyesuaian Nomenklatur Program dan Kegiatan dengan Struktur Organisasi Sekretariat Jenderal DPR RI. 2) Pembahasan kegiatan Anggota DPR RI di daerah pemilihan. 	
2.	Rapat BURT dengan Sekretariat Jenderal DPR RI Rabu, 2 Februari 2022 Agenda: Nota Penjelasan Sekjen DPR RI tentang Realisasi Anggaran DPR RI Triwulan IV Tahun 2021	Realisasi Anggaran DPR RI sampai dengan akhir Triwulan IV Tahun 2021 sebesar Rp.5.471.791.264.185,- atau 94,47% dari pagu.	
3.	Rapat Panja BURT dengan Sekretariat Jenderal DPR RI Kamis, 3 Februari 2022 Agenda: <ol style="list-style-type: none"> 1) Pendalaman Realisasi Anggaran DPR RI Triwulan IV Tahun 2021 Satker Dewan. 2) Pendalaman Realisasi Anggaran DPR RI Triwulan IV Tahun 2021 Satker Setjen. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Realisasi Anggaran DPR RI Satker Dewan sampai dengan akhir Triwulan IV Tahun 2021 sebesar Rp.3.900.692.292.119,- atau 92,76% dari pagu. 2. Realisasi Anggaran DPR RI Satker Setjen sampai dengan akhir Triwulan IV Tahun 2021 sebesar Rp.1.571.098.972.066,- atau 99,01% dari pagu. 	

NO	KEGIATAN	PERKEMBANGAN	KETERANGAN
4.	Rapat BURT dengan Tim Setjen DPR RI 4-6 Februari 2022 Agenda: Penyusunan Draf AKUPA DPR RI Tahun 2023	1. Pembahasan persentase kebutuhan anggaran DPR RI terhadap APBN. 2. Pembahasan tentang Tim Kuasa Hukum DPR RI.	
5.	Kunjungan Kerja Dalam Negeri dalam rangka Pengawasan pelayanan program Jamkestama yang dilaksanakan rumah sakit provider Asuransi Jasindo: 1. Tanggal, 23-25 Januari 2022, ke RS. National Hospital Surabaya. 2. Tanggal 30 Januari-1 Februari 2022 ke RSUD Bogor.	Peninjauan rumah sakit provider Asuransi Jasindo dimaksudkan untuk mengetahui sejauhmana program Jamkestama bagi Anggota DPR RI beserta keluarganya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, dapat digunakan sebagai bahan evaluasi bagi BURT terhadap pelayanan program Jamkestama.	
6.	Kunjungan Kerja Dalam Negeri dalam rangka Peninjauan pelayanan keprotokolan untuk Anggota DPR RI di Stasiun Kereta. Tanggal, 27-29 Januari 2022, ke Stasiun Kereta Bandung.	Setelah dilakukan penandatanganan Note Kesepahaman (MoU) antara PT. KAI dengan Sekretariat Jenderal DPR RI tentang pelayanan keprotokolan untuk Anggota di Stasiun Kereta. BURT memandang perlu melakukan peninjauan ke beberapa stasiun kereta untuk melihat kesiapan PT.KAI menyiapkan berbagai kebutuhan meliputi sarana, prasarana, serta sumber daya manusia agar proses keprotokolan untuk Anggota DPR RI saat menggunakan jasa kereta dapat berjalan dengan lancar.	

LAPORAN DWI MINGGUAN BADAN AKUNTABILITAS KEUANGAN NEGARA (BAKN)

NO	PIHAK	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	<ul style="list-style-type: none"> Kantor Wilayah BPN Provinsi Sumatera Selatan. 	Akuntabilitas Keuangan Negara.	BAKN DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Sumatera Selatan, <i>selanjutnya melakukan pertemuan dengan Kepala</i> Kantor Wilayah BPN Provinsi Sumatera Selatan dalam rangka Penelaahan BAKN DPR RI terhadap LHP BPK RI terkait permasalahan Agraria/Tata Ruang dan Badan Pertanahan Nasional.	Kunjungan Kerja, tanggal 24 s.d 26 Januari 2022
2.	<ul style="list-style-type: none"> Pemda Provinsi Kalimantan Timur; Kantor BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur, dan; Kantor Wilayah BPN Provinsi Kalimantan Timur. 	Akuntabilitas Keuangan Negara.	BAKN DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Kalimantan Timur, <i>selanjutnya melakukan pertemuan dengan Kepala</i> Kantor BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur, Pemda Provinsi Kalimantan Timur dan <i>Kepala</i> Kantor Wilayah BPN Provinsi Kalimantan Timur dalam rangka Penelaahan BAKN DPR RI terhadap LHP BPK RI terkait permasalahan Agraria/Tata Ruang dan Badan Pertanahan Nasional.	Kunjungan Kerja, tanggal 01 s.d 03 Februari 2022
